STRATEGI DIPLOMASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENAMBAHAN KUOTA JEMAAH HAJI PADA TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional

Oleh:
DINI WIDIASTUTI
NIM. I72216034

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2020

PERNYATAAN

PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahin

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	: Dini Widiastuti
NIM	: I72216034
Program Studi	: Hubungan Internasional
Judul Skripsi	: **Strategi Diplomasi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji Pada Tahun 2019**

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Blitar, 14 Desember 2020
Yang menyatakan,

Dini Widiastuti
NIM. I72216034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama	: Dini Widiastuti
NIM	: I72216034
Program Studi	: Hubungan Internasional

yang berjudul: **Strategi Diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji pada Tahun 2019,** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Salatiga, 15 Desember 2020
Pembimbing,

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.
NIP 198408232015031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Dini Widiastuti dengan judul: **"Strategi Diplomasi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji Pada tahun 2019"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 22 Desember 2020.

TIM PENGUJI

Penguji I	Penguji II
Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P.,M.A.	Mohammad Fathoni Hakim, M.Si.
NIP. 198408232015031002	NIP. 198401052011011008

Penguji III	Penguji IV
Zaky Ismail, M.S.I.	Ridha Amaliyah, S.I.P.,MBA.
NIP. 192123022011011007	NUP. 201409001

Surabaya, 22 Desember 2020
Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag., M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dini Widiastuti

NIM : I72216034

Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional

E-mail address : diniwidi55@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STRATEGI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Blitar, 22 Desember 2020

Penulis

(Dini Widiastuti)

ABSTRACT

Dini Widiastuti, *"Diplomacy Strategy of Government Republic Indonesia Increasing the Hajj Quota Pilgrims in 2019*". ***(****Undergraduate Thesis State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya , 2020).*

Keyword: *Diplomacy Strategy, Quota for pilgrims, Government Track, Religious Track.*

The author explain that Indonesia Government has tried to lobby the Kingdom of Saudi Arabia to increase the quota for pilgrims 2019 because the large of number of hajj registrants every year and lack of quotas set at KTT OKI 1987 in Aman, Yordania. Writer uses desciptive qualitative research techniques through interview and documentation. The result of this research shows that diplomacy strategy to increasing the quota for Indonesia pilgrims use two diplomacy ways. First, Government Track in the form of direct meeting between President Joko Widodo and King Salman bin Abdul Aziz, the signing of MoU by Indonesia Religious Minister about quotas and facilities of Indonesia pilgrims, holding summit meeting between the delegation DPR RI cooperation group with the Parlement of Arab Saudi and request for increasing hajj quota to Philippines. Second, Religious Track, was also called peacemaking through faith in action in the form of direct meeting between religious figures with King Salman at Merdeka Palace to lobby about the increasing of quota for pilgrims. The result, Indonesia in 2019 got the additional hajj quota of 10.000.

ABSTRAK

Dini Widiastuti, "Strategi Diplomasi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji Pada tahun 2019", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Kata Kunci: Strategi Diplomasi, Kuota Jemaah Haji, *Track Government, Track Religious.*

Penulis memaparkan tentang Pemerintah Indonesia berupaya melobi Kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota jemaah haji 2019 karena banyaknya pendaftar haji setiap tahun dan kurangnya kuota yang ditetapkan pada KTT OKI 1987 di Aman Yordania. Penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diplomasi penambahan kuota jemaah haji Indonesia menggunakan dua jalur diplomasi. Pertama, *Government Track* berupa pertemuan langsung antara Pemerintah Indonesia yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Raja Salman bin Abdul Aziz, penandatanganan MoU oleh Pemerintah Indonesia yang dilakukan Menteri Agama Indonesia tentang jumlah kuota dan fasilitas jemaah haji Indonesia, kunjungan kerja delegasi grup kerjasama DPR RI dengan Parlemen Arab Saudi, pemohonan penambahan kuota haji kepada Filipina yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, *Religious Track* atau disebut juga *peace making through faith in action* berupa pertemuan langsung tokoh agama dengan Raja Salman di Istana Merdeka untuk melobi mengenai penambahan kuota haji. Hasilnya, Indonesia pada tahun 2019 mendapat tambahan kuota haji sejumlah 10.000 jemaah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH v
PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH vi
GLOSARIUM ix
ABSTRACT xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB I ..... Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN ..... Error! Bookmark not defined.
- **A. Latar Belakang** ..... Error! Bookmark not defined.
- **B. Rumusan Masalah** ..... Error! Bookmark not defined.
- **C. Tujuan Penelitian** 8
- **D. Manfaat Penelitian** 8
- **E. Tinjauan Pustaka** 10
- **F. Batasan Masalah** 16
- **G. Argumentasi Utama** 16
- **H. Sistematika Pembahasan** 17

BAB II 20
LANDASAN KONSEPTUAL (*Conceptual Framework*) 20
- **A. Strategi Diplomasi** 20
- **B. Kuota Haji** 27
- **C. *National Interest*** 29
- **D. *Multitrack Diplomacy*** 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III **45**
METODE PENELITIAN **45**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian **45**
B. Tingkat Analisis **47**
C. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data **50**
D. Teknik Analisis Data **50**
E. Waktu dan Lokasi Penelitian **54**
F. Tahap-Tahap Penelitian **54**
G. Teknik Pengujian Data **55**
BAB IV **62**
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA **62**
A. Diplomasi Melalui *Track Government* **67**
1. Pertemuan Langsung Kepala Negara **68**
2. Penandatanganan MoU Menteri Agama RI dengan Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan **71**
3. Kunjungan Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Parlemen Arab saudi **77**
4. Memohon Pengalihan Kuota Jemaah Haji Negara Filipina **79**
B. Diplomasi Melalui *Track Religious*: Peran Ulama' Dalam Melobi Kerajaan Arab Saudi **82**
BAB V **90**
PENUTUP **90**
A. Kesimpulan **90**
B. Saran **91**
DAFTAR PUSTAKA **93**
LAMPIRAN **102**
Wawancara 1 ..... **102**
Wawancara 2 ..... **104**
Wawancara 3 ..... **110**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagrampeningkatan jumlah kuota jemaah haji Indonesia 6
Gambar 2.2 *Ring Multi Track Diplomacy*..... 34
Gambar 2.2 *Multi Track Diplomacy definition 9 track*..... 35
Gambar 3.1 *Level of analysis*..... 48
Gambar 3.2 Teknik analisis data..... 52
Gambar 3.3 Tahap-tahap penelitian..... 55
Gambar 3.4 Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 56
Gambar 3.5 Uji Kredibilitas..... 57
Gambar 4.1 Pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Raja Salman..... 70
Gambar 4.2 Pertemuan bilateral Presiden Indonesia dengan Raja Arab Saudi 71
Gambar 4.3 Menteri Lukman Hakim dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi untuk menandatangani MoU penyelenggaraan haji tahun 2019..... 76
Gambar 4.4 Diskusi GKSB dengan Majelis Syura Arab Saudi..... 78
Gambar 4.5 Keinginan pengalihan kuota haji disampaikan langsung Presiden Joko Widodo kepada Presiden Rodrigo Duterte..... 81
Gambar 4.6 Pertemuan Raja Salman bersama Tokoh Islam di Istana Merdeka... 88
Gambar 5.1 Wawancara dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh..... 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arab Saudi dan Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya muslim. Negara Indonesia sendiri adalah mitra bagi Arab Saudi, hubungan diplomatik Kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia sudah berlangsung lama yakni kurang lebih dari abad pertama hijriyah. Dimulai dengan adanya hubungan jual beli atau perdagangan serta menyebarkan Agama Islam yang sangat berpengaruh kepada masyarakat Indonesia sampai saat ini.[2] Hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi tercatat pada tanggal 1 Mei 1950 atau tepatnya lima tahun setelah kemerdekaan Indonesia.

Hubungan Kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Republik Indonesia bertujuan untuk mempererat kerjasama pada bidang-bidang tertentu dengan cara menggunakan prinsip saling menghormati, menghargai dan saling menguntungkan antara kedua negara. Tujuan dari hubungan antar kedua negara tersebut didasari dengan prinsip-prinsip tersebut adalah untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan penduduk Negara Indonesia dan Arab Saudi.[3] Pemerintah Republik Indonesia dengan

[2] Putuhena, M. Shaleh. 2007. "*Histografi Indonesia*", Yogyakarta: LkiS, hal. 22. Dikutip dari http://respository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/skripsi.docx?sequence=1 diakses tanggal 9 Oktober 2019.

[3] Mustafa Abd. Rahman. "Era Baru Arab Saudi Melirik ke Timur" Harian Kompas. Diakses pada 9 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerajaan Arab Saudi telah menjalin hubungan yang dekat serta bersejarah sejak dulu, bahkan terjalin sebelum adanya kunjungan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia pada tahun 2017. Pemrintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi menjalin hubungan diplomatik yang kuat terutama pada sekitar tiga tahun belakangan ini, kemudian ditambah adanya kepala negara yang saling mengunjungi. Pertama dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili langsung Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi tahun 2015, setelah itu Raja Arab Saudi yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz berkunjung ke Negara Indonesia pada tahun 2017 lalu.

Tahun yang penting dalam hubungan diplomatik antara Kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia adalah pada tahun 2017, karena terdapat kunjungan dari Kerajaan Arab Saudi ke Negara Indonesia yang menjadikan semakin eratnya dan menambah intesitas kolaborasi serta intensitas interaksi antara kedua negara tersebut. Tahun 2017 terdapata pula kunjungan kepala negara serta menteri yang belum pernah terselenggarakan sebelumnya serta banyaknya kesepakatan yang disahkan pada tahun 2017, yaitu ada sebelas perjanjian di banyak sektor yang disepakati oleh kedua negara.

Hubungan antara kedua negara diperkuat adanya kesamaan pemahaman agama dan politik serta kebudayaan, sehingga Kerajaan Arab Saudi dan Negara indonesia memiliki ikatan emosional yang cukup tinggi bahkan sudah selama bertahun-tahun. Kedua negara bersepakat membentuk sidang komisi yang bertujuan untuk membahas berbagai masalah dan perkembangan hubungan Pemerintah Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Kerajaan Arab Saudi di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi, perdagangan energi, sosial budaya, ketenaga kerjaan serta keagamaan.[4]

Diantara banyaknya kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab saudi, kerjasama yang paling mencolok dan paling terlihat adalah bidang agama ditandai dengan ibadah haji yang dimana Indonesia rutin mengirim jemaah haji ke Arab Saudi setiap tahunnya dan juga salah satu visi Arab Saudi adalah ingin menjadikan negaranya sebagai *The Heart of Islamic of The Arab and Islamic World* yang bertujuan memberi dampak positif terhadap hubungan kerjasama ekonomi khususnya di bidang haji, maka dari itu kunjungan yang dilakukan Raja Arab Saudi ke Indonesia pada tahun 2017 bermaksud untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara.[5]

Mekanisme penetapan kuota haji sudah terselenggara sejak tahun 1987. Penetapan tersebut berdasarkan pada keputusan Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987 di Amman, Yordania. Dalam sidang OKI tersebut menetapan kuota jemaah haji sebesar 1:1000 (satu per mil) dari jumlah penduduk muslim di suatu negara yang mengirim jemaah haji. Besarnya penduduk Muslim didasarkan atas data resmi penduduk suatu negara yang ada di PBB. Dalam pelaksanaan ketentuan OKI tersebut, kuota setiap negara ditetapkan oleh

---

[4] Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh. Hlm. 2

[5] Ziyad Falah, "*Prospek Regionalisme Timur Tengah Pasca Arab Spring: Telaah terhadap identitas kolektif Liga Arab*" Jurnal Kajian Wilayah, vol. 3 no. 2, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerajaan Arab Saudi melalui pembahasan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan masing-masing negara pengirim jemaah haji. Pada tahun 2019 berdasarkan MoU jumlah kuota yang diberikan sebanyak 221.000 jemaah haji, yang diperuntukkan bagi jemaah haji jalur reguler sebanyak 204.000 dan jemaah jalur khusus sebanyak 17.000.[6]

Minimnya kuota haji Indonesia yang ditetapkan pada KTT OKI ini kemudian semakin diperparah oleh kondisi di Arab Saudi yang sedang merenovasi Masjidil Haram, sehingga beberapa tahun belakangan ini porsi kuota haji Indonesia dipangkas. Jumlah yang diterapkan KTT OKI sejak 1987 ternyata tidak sebanding dengan jumlah penduduk Negara Indonesia yang terus meningkat secara pesat setiap tahunnya, Negara Indonesia perlu peningkatan kuota dalam jumlah besar karena penduduk yang mayoritas muslim dan juga kuota yang ditetapkan tersebut masih belum mencukupi bagi Indonesia yang melihat daftar tunggu jemaah haji sudah sampai bertahun-tahun.[7]

Dari daftar tunggu yang terdapat di situs Kementerian Agama Republik Indonesia, bahkan di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai jangka tunggu atau masa tunggu pemberangkatan haji paling lama sampai tahun 2055, hal ini menunjukkan bahwa membutuhkan penantian panjang untuk menunaikan ibadah sehingga calon jemaah haji tidak bisa berangkat ke Mekah secara cepat. Sebenarnya, tidak hanya persoalan penetapan kuota yang minim saja dari Kerajaan Arab Saudi

[6] Wawancara penulis dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia pada 10 Februari 2020.

[7] http://umroh.travel/kuota-haji-terbanyak/ diakses pada tanggal 9 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk Negara Indonesia, tetapi juga perlu pembenahan secara menyeluruh dari pemerintah agar jemaah haji Indonesia tidak terlalu lama menunggu antrian berangkat haji. Namun demikian, dari sejak kesepakatan KTT OKI 1987 hingga sekarang, asumsi kuota haji Indonesia kelihatannya tetap sejak 1986, yaitu hanya 200.000 orang jemaah. Padahal jumlah penduduk Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan adanya problematika seperti ini, Pemerintah Republik Indonesia berupaya menambah kuota jemaah haji dengan cara melobi Kerajaan Arab Saudi pada saat kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia.[8]

Kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz pada bulan Maret 2017 bertujuan menjalin silaturahmi serta melakukan investasi. Dalam kunjungan Raja Salman tersebut membahas tentang rencana investasi sebesar 15 Milyar USD atau 200 Triliun Rupiah. Namun pada akhirnya kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz tersebut hanya meninggalkan 89 Triliun rupiah. Investasi tersebut berfokus pada pengelolaan minyak mentah dan jasa haji dan umroh.[9]

Kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk melobi penambahan kuota jemaah haji. Karena sejak tahun 2013 adanya renovasi Masjidil Haram sejak tahun 2013 membuat kuota jemaah haji dipotong 20 persen. Pada tahun 2017, jumlah kuota jemaah haji Indonesia dikembalikan menjadi normal yaitu

[8] http://www.kompasiana.com/syahrulalimuzer/politisasi-arab-saudi-dankuota-haji-indonesia_57cfd40afd8c68aa0047 diakses pada 11 Oktober 2019.

[9] Ninda Ardiani, "*Investasi Raja Salman di indonesia dalam Pandangan Ekonomi makro islam*", vol.6 no. 1, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

221.000 jemaah setelah dipotong 168.800 jemaah.[10] Selain penormalan jumlah kuota jemaah haji bagi Negara Indonesia, Kerajaan Arab saudi menyetujui adanya tambahan kuota jemaah haji sebanyak 10.000 jemaah untuk digunakan pada tahun 2019.

Tabel 1: *Jumlah data Kuota haji Dari Tahun 2015-2019*[11]

Gambar 1.1: Diagram Peningkatan Jumlah Kuota Jemaah Haji Negara Indonesia

Sumber: Kemenag RI/riset:Bayu D/Jatimnet.com

[10] Keputusan Menteri Agama Republik indonesia Nomor 29, tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Jemaaah Haji tahun 1440H/2019M.

[11] Kuota dan Biaya Haji Indonesia 2008-2019, diakses pada 1 Desember 2019, Sumber Kemenag RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah jemaah haji Indonesia yang cukup besar yaitu 221.000 di tahun 2017 dan 231.000 di tahun 2019 dengan jumlah penduduk lebih dari 263 juta dan 87 persen adalah penganut muslim, jemaah haji Indonesia menempati peringkat pertama di dunia. Urutan kedua yaitu Pakistan dengan jumlah jemaah haji 179.000, selanjutnya India dengan jumlah 170.000, Bangladesh dengan jumlah 128.000, dan Mesir dengan jumlah kuota 108.000 .[12]

Melihat pemaparan yang sudah ditulis dalam latar belakang, menjadi pembahasan yang menarik dan juga penulis mengambil tema tersebut dikarenakan penulis ingin meneliti bagaimana strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menambah kuota jemaah haji karena masih belum cukupnya kuota yang diputuskan saat KTT OKI 1987 kepada Indonesia, sehingga daftar tunggu pemberangkatan haji sangat lama namun pada tahun 2019, Indonesia mendapat tambahan kuota jemaah haji sejumlah 10.000 jemaah. Maka penulis memberi judul penelitian ini **"Strategi Diplomasi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji Pada Tahun 2019"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis mendapatkan suatu pokok masalah yaitu: **"Bagaimana strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menambah kuota jemaah haji pada tahun 2019?"**.

[12] Distribusi Jatah Haji Arab saudi, diakses pada 2 Desember 2019, Sumber: http:/ww.alaraby.co.uk/amp//society/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Setelah menampilkan rumusan masalah yang menjadi fokus penulis dalam meneliti, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji pada tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu penulis dapat ikut dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional khusunya yang berkaitan dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya, pembaca serta mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional pada umumnya.

2. Manfaat praktis

Pada penelitian ini terdapat pula manfaat praktis. Manfaat praktis adalah berupa saran bagi beberapa pihak yang terkait, diantaranya ada Pemerintah Republik Indonesia maupun Kerajaan Arab Saudi sebagai objek dari penelitian, penulis serta masyarakat yang membaca penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemerintah

Manfaat bagi Pemerinta Republik Indonesia maupun Arab Saudi yaitu agar bisa menjaga hubungan baik antara kedua negara. Penelitian ini dapat juga dipakai untuk bahan pertimbangan bagi Pemerintah Republik Indonesia maupun Arab Saudi dalam menentukan dan membuat kebijakan luar negeri, khususnya untuk membuat kebijakan penambahan kuota jemaah haji tahun berikutnya.

b. Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu berharap dengan meneliti masalah ini, dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji pada tahun 2019.

c. Mayarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu untuk menambah wawasan agar tidak apatis terhadap isu seperti penambahan kuota haji dan tetap memperhatikan peran dari pihak-pihak dalam hubungan bilateral antara Pemerintah Republik Indoesia dan Kerajaan Arab Saudi maupun negara lain, serta masyarakat juga bisa memilah dan mengambil nilai-nilai dan hal positif yang terdapat pada penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan, penulis memaparkan penelitian-penelitian yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini serta guna dijadikan bahan acu atau rujukan oleh penulis dalam penulisan penelitian yang sedang dilakukan. Di bawah ini terdapat beberapa tulisan yang menurut penulis ada kaitannya dengan apa yang ditulis oleh penulis:

1. Penelitian pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Fadhylatur Rizqah Isdah, yang berjudul *"Hubungan Bilateral Arab Saudi-Indonesia Di Era Raja Salman-Joko Widodo".* Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor eratnya hubungan antara Arab Saudi dan Indonesia serta membahas bagaimana cara agar lebih mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Sehingga dalam kunjungan Raja Arab Saudi yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia membahas beberapa kerjasama atar kedua negara dengan adanya investasi Arab Saudi ke Indonesia. Penelitian ini juga membahas tentang tujuan adanya kerjasama antar kedua negara akan mendukung *Saudi Vision 2030*.[13] Perbedaan dengan penelitian yang ditulis yaitu penulis memfokuskan hasil program kerjasama di bidang haji dan penambahan kuota haji serta penelitian yang ditulis menjelaskan dari sudut pandang Indonesia karena Indonesia memiliki kepentingan yakni penambahan kuota haji.

[13] Fadhylatur Rizqah Isdah, "*Hubungan Bilateral Arab Saudi-Indonesia di Era Pemerintahan Raja Salman dan Jokowidodo"*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian skripsi oleh Trianto Saputro yang berjudul *"Hubungan Diplomasi Dengan Negara-negara Arab Pada Masa Pemerintahan Sukarno".* Penelitian ini membahas tentang mengembangkan hubungan diplomasi yang terjalin antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara-negara Arab Saudi setelah perang dunia II. Pasca perang dunia ke II, Indonesia masih membutuhkan pengakuan kemerdekaan dari negara-negara lain. Maka dari itu, Presiden Soekarno menjalin hubungan dengan negara-negara Arab, dengan kebudayaan yang sama karena Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas menganut Agama Islam. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis yaitu penulis berfokus pada Kerajaan Arab Saudi saja guna menambahkan kuota jemaah haji bagi Indonesia.[14]
3. Penelitian yang ketiga yaitu jurnal ditulis oleh Elisabeth M. Monica dan Rosalyn Theodora yang berjudul *"Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018"*. Jurnal ini membahas tentang hubungan Negara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang ketenaga kerjaan sehingga Pemerintah Republik Indonesia mengatur perlindungan diplomatik terhadap pekerja migran di Arab Saudi.[15]
4. Penelitian yang keempat yaitu skripsi yang ditulis oleh Munawir Ahmad yang berjudul *"Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi Dalam Penyelenggaraan*

---

[14]Trianto Saputro, "*Hubungan Diplomasi dengan Negara-negara Arab Saudi pada Masa Pemerintahan Sukarno"*, Skripsi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017.

[15]Elisabeth M. Monica dan Rosalyn Theodora, *"Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018"*, Julrnal Studi Diplomasi dan Kemanan. Vol. 11, No. 1, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibadah Haji". Penelitian ini membahas tentang hubungan antar kedua negara yaitu Indonesia dengan Arab Saudi dalam penyelenggaraan Ibadah haji secara umum serta kendala-kendala yang dihadapi. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis, peneliti berfokus pada penambahan kuota jamaah haji pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun itu, ada peningkatan jumlah kuota jemaah haji Indonesia setelah diadakannya *lobbying* pada saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia.[16]

5. Penelitian yang dipaparkan oleh Kevin Aghata Salwadi, berjudul *"Alasan Peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia".* Penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang peningkatan *Foreign Direct Investment (FDI)* di Negara Indonesia, mejelaskan tentang strategi Arab Saudi berinvestasi di Indonesia serta alasan Arab Saudi memilih Indonesia sebagai *host country* investasinya.[17] Perbedaan dengan penelitian yg ditulis peneliti yaitu peneliti lebih spesifik menjelaskannya penambahan kuota haji Indonesia.
6. Penelitian yang keenam yaitu jurnal yang ditulis oleh Nevilta Sianturi yang judulnya adalah *"Pengaruh Saudi Vision 2030 dan Agenda Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia"* dari jurnal ini, penulis memaparkan bahwa penelitiannya membahas kerjasama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi di bidang ekonomi, Reformasi ekonomi Kerajaan Arab Saudi disebut Saudi Vision 2030 sangat mempengaruhi pada

[16]Munawir Ahmad, "*Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*", skripsi Universitas Hasanuddin, 2011.

[17] Kevin Agatha Salwadi, *"Alasan peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia"*, Jurnal Fis HI, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama berupa investasi oleh Kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Republik Indonesia. Hubungan antara kedua negara terjalin sudah sejak dulu dan tentunya sudah menghasilkan berbagai macam kerjasama dan kebijakan yang disepakati antara kedua negara, dengan demikian hal seperti ini tidak terlepas dari Negara Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam serta penganut Islam terbesar di dunia. Dengan adanya *Saudi Vision 2030*, membuat Negara Indonesia termasuk negara tujuan investasi di berbagai sektor. Aspek ekonomi adalah aspek yamg paling penting dalam melatar belakangi pada kunjungan dan adanya investasi Kerajaan Arab saudi. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah, penelitian ini membahas tentang diplomasi penambahan kuota haji Pemerintah Republik Indonesia pada saat kunjungan Kerajaan Arab Saudi ke Indonesia, namun dengan demikian tetap terdapat kepentingan pada masing-masing negara.

7. Penelitian ketujuh yaitu skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhni yang berjudul *"Diplomasi Pemerintah Indonesia Dengan Arab Saudi Dalam Meningkatkan Kuota Haji Indonesia"*. Pada penelitian ini dijelaskan alasan dan upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan kuota haji karena minimnya kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi sehingga masa tunggu calon jemaah haji sangat lama.[18] Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, penulis memfokuskan pada tahun 2019 karena pada tahun tersebut adanya

[18]Ahmad Muhni, "*Diplomasi Pemerintah Indonesia Dengan Arab Saudi Dalam Meningkatkan Kuota Haji Indonesia*", Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambahan kuota jemaah haji sejumlah 10.000 jemaah, sehingga Negara Indonesia memiliki kuota haji 231.000 jemaah. Penulis menggunakan konsep *multitrack diplomacy* yang melalui dua jalur yaitu *government track* dan *religious track*. Pada skripsi ini. Penulis menjelaskan dalam *government track* selain melobi Kerajaan Arab Saudi, Pemerintah Indonesia juga memohon pengalihan kuota jemaaah haji dari Negara Filipina sedangkan dari jalur agama atau *religious track* yaitu peran tokoh agama yang ikut serta dalam melobi Raja Salman pada kunjungan tahun 2017 ke Indonesia.

8. Penelitian ke delapan yaitu skripsi yang ditulis oleh Ariqoh Yasinta Sigit dengan judul *"Langkah Diplomatik Indonesia Terhadap Kerajaan Arab saudi Dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji Indonesia (Studi kasus: Penyelenggaraan Ibadah haji 2012-2018)",* dalam penelitian ini dijelaskan langkah-langkah diplomasi apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penambahan kuota haji pada tahun 2012 hingga 2018.[19] Pada penelitian Yasinta Sigit hanya membahas tentang langkah-langkah diplomasi sampai tahun 2018 yang dimana pada tahun itu hanya terjadi pengembalian kuota karena renovasi masjidil haram telah selesai dan juga menggunakan jalur pemerintahan saja. Perbedaan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis adalah penulis berfokus pada tahun 2019 karena adanya penambahan kuota jemaah haji sejumlah 10.000 pada tahun tersebut

[19]Ariqoh Yasinta Sigit, "*Langkah Diplomatik Indonesia Terhadap Kerajaan Arab Saudi Dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji Indonesia*", Skripsi Universitas Pmebangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga Negara Indonesia menjadi negara pengirim haji terbanyak yaitu 231.000 jemaah. Penulis juga menemukan adanya diplomasi yang dilakukan oleh tokoh muslim yang bertemu langsung dengan Raja Salman untuk melobi penambahan kuota jemaah haji pada kunjungan tahun 2017 di Istana Merdeka.

9. Penelitian kesembilan yaitu jurnal yang ditulis oleh Halifa Haqqi, S.I.P., M.A., Annas Faundra, dan Dra. Christy Damayanti, M.Si. Judulnya yaitu "*Diplomasi Pemerintah Indonesia Kepada Arab Saudi Tentang Penambahan Kuota Haji*". Jurnal ini menjelaskan tentang diplomasi pada saat KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari pada saaat kolonial Belanda serta pemotongan kuota haji karena adanya renovasi Masjidil Haram. Jurnal ini menggunakan *first track* dan *second track* yaitu diplomasi negara dan non negara untuk menganalisis penelitiannya.[20] Berbeda dengan pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu penulis langsung menjelaskan bagaimana strategi diplomasi yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia untuk menambah kuota jemaah haji pada tahun 2019 karena pada tahun tersebut kuota jemaah haji Indonesia bertambah hingga 231.000 jemaah. Penulis menggunakan *multitrack diplomacy* yaitu pengembangan dari *first track* dan *second track*. Pada konsep *multitrack diplomacy*, penulis menggunakan *track government* atau pemerintah karena lobi dilakukan oleh Pemerintan Republik Indonesia dan *track religious* karena terdapat aktor ulama'

[20] Halifa Haqqi, S.I.P., M.A., Annas Faundra, Dra. Crhisty Damayanti, M.Si. "*Diplomasi Pemerintah Indonesia Kepada Arab Saudi Tentang Penambahan Kuota Haji Indonesia*". Vol. 1 No. 1. Ejurnal.unisri.ac.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tokoh muslim di Indonesia dalam melobi Kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota jemaah haji.

Dengan adanya tinjauan pustaka yang telah dilakukan, maka penulis melihat masih ada celah untuk bisa membahas strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji pada tahun 2019, sehingga penulis memutuskan untuk meneliti isu tersebut.

F. Batasan Masalah

Agar mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan lingkup kajian supaya tidak melenceng dan melebar dari tema maupun tujuan yang ditentukan. Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji pada tahun 2019. Peneliti membatasi pada tahun 2019, karena pada tahun tersebut kuota jemaah haji meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 10.000 jemaah. Sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti bagaimana strategi diplomasi yang diterapkan Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu.

G. Argumentasi Utama

Dari pemaparan di atas, maka penelitian berjudul *"Strategi Diplomasi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji Pada Tahun 2019"* penulis menduga bahwa dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia menggunakan strategi diplomasi *Multitrack* melalui jalur satu atau jalur pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jalur tujuh atau jalur agama untuk melobi Kerajaan Arab Saudi agar mau menambah kuota jemaah haji Negara Indonesia. Pelaksaan strategi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melakukan *lobbying* dan membuat MoU atau perjanjian sebagai cara berdiplomasi untuk mengupayakan penambahan kuota jemaah haji. Diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji terdiri dari dua jalur yaitu jalur pemerintahan dan jalur agama demi meningkatkan kualitas kebijakan dalam upaya penambahan kuota jemaah haji Indonesia pada tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini oleh penulis sistematika penulisan dibagi menjadi lima bagian agar supaya mempermudah pembaca untuk memahami penelitian ini.

1. BAB I PENDAHULUAN

   Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa penulis meneliti masalah ini, rumusan masalah yang menjadi fokus utama pada penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, batasan masalah agar pembahasan tidak melebar, argumentasi utama yaitu berisi argumentasi penulis, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. BAB II LANDASAN KONSEPTUAL *(Conceptual Framework)*

Pada bab kedua berisi tentang landasan konseptual. Dalam bab dua dipaparkan oleh penulis yaitu landasan konseptual dimana konsep yang penulis gunakan membantu dalam menganalisa masalah yang sedang diteliti. Penulis menggunakan konsep strategi diplomasi dan *multitrack diplomacy*. Dengan konsep ini, penulis dapat menganalisis permasalahan yang diteliti yaitu strategi diplomasi Negara Republik Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji pada tahun 2019.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga, penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam menganalisa masalah. Metode penelitian yang digunakan dan dipaparkan dalam bab ketiga yaitu metode pendekatan dan jenis penelitian, tingkat analisis, teknik pengumpulan data dan sumber data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengujian data.

4. BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab keempat penulis memaparkan data-data yang didapat. Data yang dipaparkan dalam bab empat ini berupa data primer maupun data skunder yang bisa mendukung dan menguatkan penelitian ini. Dalam bab ini juga dijelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis secara berurutan sesuai rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini dan digunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji pada tahun 2019.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab kelima ini merupakan penutup atau akhir dari penelitian. Dalam bagian ini, penulis memaparkan serangkaian pembahasan sebelumnya yang berisi tentang kesimpulan atau hasil penelitian penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menggunakan konsep yang telah ditentukan untuk menganalisa masalah sehingga dapat menjawab rumusan masalah serta saran untuk pihak terkait dalam penelitian ini, sehingga dapat mengembangkan dan memperbaiki penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama di masa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL *(CONCEPTUAL FRAMEWORK)*

Penelitain ini akan menggunakan konsep Strategi Diplomasi. Konsep menurut Soedjadi yaitu ide atau gagasan abstrak yang digunakan untuk mengklasifikasi atau menggolongkan suatu istilah. Sedangkan menurut Singarimbun dan Efendi, konsep yaitu definisi dan istilah yang dipakai dalam penggambaran atau paparan secara abstrak suatu masalah, kejadian suatu kelompok maupun individu yang menjadi objek pengamatan atau penelitian.[21] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep untuk membantu mengembangkan pertanyaan penelitian dan menganalisa fenomena yang sedang diteliti. Penulis menggunakan konsep Strategi Diplomasi, *National Interest*, *Multitrack Diplomacy*, *Government Track*, dan *Religious Track.*

A. Strategi Diplomasi

Dipaparkan oleh Ernest Satow dan Mohammad Shoelhi diplomasi adalah taktik dan kecerdasan dalam suatu hubungan formal atau resmi, hal ini melebar hingga adanya hubungan bisnis antara negara-negara dengan cara damai tanpa adanya kekerasan dan juga militer. Taktik serta kecerdasan sangat penting dalam melobi dan

[21]Singarimbun, Masri dan Efendi, hal. 33 dalam Mujdia Raharjo. "*Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel, dan Hipotesis dalam Penelitian*", hal. 1. Diakses pada 9 November 2019, http://repository.uin-malang.ac.id/2410/2/2410.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kegiatan negosiasi karena dapat menentukan berhasil atau tidak sebuah diplomasi, setelah itu dibentuk menjadi sebuah konsep yang dinamakan strategi.[22]

Dalam berdiplomasi, strategi sangat diperlukan karena tanpa strategi seorang diplomat akan menemukan kegagalan dalam diplomasi. Onong Uchjana Effendy mengatakan bahwa strategi diplomasi secara makro maupun mikro memiliki kegunaan dobel yakni menyampaikan pesan melalui komunikasi yang ditunjukkan dengan informatif persuasif dan intruksi dengan sistematis terhadap objek untuk memperoleh hasil secara maksimal dan juga menyatukan kesenjangan budaya. Strategi diplomasi merupakan panduan perencanaan diplomasi dan pengelolaan diplomasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penentuan strategi diplomasi ada suatu susunan yaitu penyusunan rencana dengan cara yang sistematis (*designing*), simulasi memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi (*preconditioning*), menguji diplomasi sejauh mana pesan yang disampaikan akan ditanggapi (*conditioning*), diplomasi yang dilakukan saat peperangan (*exercising*), evaluasi hasil diplomasi (*evaluating*), hasil dipomasi yang dijadikan acuan (*reapproacing or concluding*).

1. Strategi

Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa indonesia, dijelaskan bahwa strategi merupakan *planning* yang dilakukan secara cermat yang bersangkutan dengan

[22] Mohammad Shoelhi, "*Diplomasi Praktik komunikasi Internasional*", Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011. Hal. 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku yang dilakukan oleh aktor untuk mencapai suatu sasaran khusus.[23] Didalam sumber lain yaitu menurut *oxford dictionary*, strategi yaitu sebuah rancangan atau rencana untuk melakukan aksi dalam mencapai suatu tujuan dalam waktu dan masa.[24] Dikatakan oleh Kacmar, Anthony, Parrewe yaitu strategi adalah sebuah misis atau rencana maupun tujuan yang direalisasikan kedalam bentuk suatu aksi untuk mecapai tujuan yang selalu memperhatikan kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi.[25]

Dari pemaparan di atas, dapat diartikan definisi strategi yaitu proses dalam rencana atau sebuah trik dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan, tidak hanya *palnning* atau rencana, namun strategi menunjukkan bagaimana cara melaksanakan langkah-langkah secara sistematis dan tepat, efisien serta efektif agar memudahkan proses dalam pelaksanaannya. Strategi juga bisa menjadi acuan ataupun pegangan dalam mencapai hasil maupun tujuan yang diharapkan oleh sebuah perusahaan, lembaga negara, maupun individu.

2. Diplomasi

Diplomasi sendiri memiliki pengertian yang luas serta mencakup banyak aksi atau kegiatan. Dalam kamus Terminologi Hukum Internasional yang diterbitkan oleh Universitas Sorbonne di Paris Prancis, diplomasi memiliki definisi yaitu kepintaran,

---

[23] "*Definisi Strategi*", KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 8 Januari 2020, https://kbbi.webid/strategi.

[24] "*The definition of strategy*", Oxford Dictionary, dilihat 8 Januari 2020, https://en.oxforddictionaries.com/definition/strategy.

[25] Anthony, WP., P. L., dan Kacmar, KM, "*Strategic Human Reseource Management*", Second Edition. Orlando: rcourt Brace and Company, 1999. Hal. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemahiran, kreativitas atau keterampilan, keahlian dan ketelitian yang dianggap sangat penting untuk seorang pejabat dalam menangani suatu konflik maupun isu internasional.

Diplomasi berasal dari kata Yunani *diploun* yang artinya melipat. Dalam buku yang berjudul *The Principle and Practice of Diplomacy* karya KM Panikkar mengatakan bahwa diplomasi berkaitan dengan hubungan intenasional terutama pada pembahasan politik internasional. Keterkaitan antara diplomasi dengan politik internasional yaitu sama-sama sebuah seni yang mengedepankan kepentingan negara dalam hubungan suatu negara dengan negara atau kelompok maupun individu lain. Definisi dari Ivo D. Duchacek, diplomasi adalah praktik politik luar negeri suatu negara.[26]

Definisi diplomasi menurut cendekiawan Inggris yang juga seorang diplomat bernama Ernest Satouw yaitu suatu pengimplementasian akal pikiran atau kecerdasan dan kebijaksanaan yang dilakukan pada suatu aksi dibandingkan dengan hubungan dinas atau formal antara pemerintah dari beberapa negara yang merdeka, hal ini juga dijelaskan dalam hubungan antara pemerintah dengan negara asal, atau lebih singkatnya yaitu sebuah aksi yang didasari kewajiban atau tugas antara negara dengan maksud damai.[27]

---

[26] Roy, S. L., "*Diplomasi*", Jakarta: PT. Grafindo Raja Perkasa. 1995.

[27] Ernest satow, "*Guide to Diplomacy Practice*", 1957. https://www.cambridge.org diakses pada 8 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas definisi diplomasi menurut Ernest Satow yaitu ketangkasan dan keterampilan dalam aksi atau perilaku dibandingkan pergaulan internasioal. Dalam *Oxford English Dictionary* dijelaskan definisi-definisi diplomasi yaitu sebagai berikut:

a. Diplomasi merupakan pengendalian dan juga menjaga hubungan-hubungan internasional.
b. Diplomasi yaitu trik atau cara dalam mengendalikan serta memelihara hubungan internasional yang dilakukan oleh duta besar yang ditunjuk oleh negara.
c. Diplomasi yaitu sebuah aksi, pengetahuan dan juga kebijaksanaan seorang diplomat.

Dijelaskan oleh Mu'in BA diplomasi yaitu suatu kegiatan yang menggunakan semua kecerdasan dan kebijaksanaan dalam melakukan dan menjaga hubungan formal antara pemerintah negara-negara. Mu'in BA juga mengemukakan alat yang dilakukan dalaam kegiatan diplomasi yaitu perundingan dan musyawarah. Musyawarah bisa juga dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan atau konferensi dan juga dengan perantaraan surat menyurat serta pertukaran nota kesepahaman maupun perjanjian.[28]

Definisi di atas sudah sangat jelas bahwa diplomasi berkaitan dengan aspek-aspek yang luas sekali, baik tentang cara, kebijakan, aktor, lembaga serta profesi. Pada

[28] Moh. Mu'in, "*Perjuangan Diplomasi dan Politik Luar Negeri*", Pustaka Azam, 1982. Hal. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya diplomasi mengacu pada seni atau keterampilan, teknik atau cara pendekatan maupun lobi dan negosiasi dalam mencapai suatu kepentingan sosial negara dan langkah-langkah serta teknik yang digunakan dalam mengamankan kepentingan tersebut. Dalam menjalin hubungan dan kerjasama yang baik secara damai dengan negara lain.

Seorang praktisi dan pengkaji dalam bidang diplomasi pada abad ke-20 bernama Horald Nicolas mengatakan bahwa kata diplomasi dipakai dengan tujuan untuk menegaskan limah hal yang berbeda, dari lima hal tersebut memiliki empat hal yang paling penting yaitu politik luar negeri, negosiasi, tata cara pelaksanaan negosiasi serta cabang dinas luar negeri. Hal penting yang kelima adalah keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional.[29] Fokus utama dari diplomasi adalah tujuan atau keinginan negara dalam membangun hubungan yang baik dan damai dengan negara lain melalui negosiasi yang memerlukan kepiawaian dalam penyampaian serta bersikap dan juga dengan cara lainnya tanpa menggunakan kekerasan maupun militer.

Diplomasi sendiri mengalami transformasi karena adanya perkembangan jaman, jika dilihat dari sejarahnya, diplomasi ini sudah dilakukan sejak berabad-abad. Jaman yang sudah maju seperti saat ini, konsep serta teori yang berkaitan dengan diplomasi mengalami perkembangan dan muncul istilah-istilah dan juga permikiran

[29] Dikutip dalam https://a-research.upi.edu/operator/uploas/s_sej_0705418_chapter2(1).pdf. Hal. 16, diakses pada 18 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru yang disebut *Multitrack Diplomacy* atau juga pengembangan dari *First Track Diplomacy* dan *Second Track Diplomacy*. Joseph Montville merupakan tokoh yang mengemukakan konsep ini pertama kali yang kemudian dikembangkan menjadi lima hingga sembilan jalur baru oleh Mcdonald dan Louise Diamond. Pengembangan Konsep ini muncul karena aktor diplomasi juga ikut berkembang dan bervariasi tidak hanya negara namun juga non negara seperti kelompok hingga individu yang ikut andil didalam aksi diplomasi.

B. Kuota haji

Kuota haji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jumlah dan batasan yang ditentukan atau nilai maksimum yang telah ditentukan. Secara bahasa, haji adalah *Al-Hajju* yang berarti menuju atau menyengaja. Sedangkan pengertian jemaah haji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu rukun islam yang nomor lima atau kewajiban menjalankan ibadah yang wajib atau harus dilakukan oleh umat islam yang mampu untuk mengunjungi *ka'bah* di Masjidil Haram Mekah pada bulan yang sudah ditentukan, dengan menjalankan amalan seperti ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf serta tahalul.[30] Secara istilah, kumpulan ataupun rombongan orang yang melakukan ibadah haji atau jemaah haji merupakan warga negara penganut muslim yang sudah mendaftar guna menjalankan ibadah haji ke tanah suci dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Haji menurut para ulama' adalah menuju ka'bah

[30] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu pada waktu tertentu pada bulan-bulan haji seperti Syawal, Zulqaidah dan Zulhijah.[31]

Kuota haji merupakan batasan maksimum jumlah calon jemaah yang akan menunaikan ibadah haji, yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi mengacu pada keputusan KTT OKI pada tahun 1987 yaitu 1:1000 dari jumlah penduduk penganut Agama Islam pada masing-masing negara. Dengan adanya ketetapan ini, karena adanya ketidak seimbangan antara pendaftar haji setiap tahunnya dan jumlah kuota yang diberikan. Calon jemaaah haji harus menunggu bertahun-tahun untuk berangkat menunaikan ibadah haji sehingga *waiting list* sangat lama. *Waiting List* sendiri artinya daftar tunggu, calon jemaaah haji yang sudah mendaftarkan diri dan juga sudah mendapat nomor namun belum bisa berangkat haji, terpaksa menunggu lama hingga waktu yang sudah ditentukan jumlah pendaftar setiap tahunnya melebihi kuota keberangkatan.[32]

Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Islam atau disebut KTT OKI di Amman Yordania pada tahun 1987, mengesahkan tata cara menentukan kuota jemaah haji setiap negara. Dalam KTT OKI tersebut ditetapkan kuota haji 1:1000 yaitu satu dari setiap seribu orang penduduk yang menganut Islam pada suatu negara yang berhak mendapatkan antrian jemaah haji. Dengan keputusan ini, sesungguhnya Negara Indonesia sudah mendapatkan kuota jemaah haji terbanyak di antara negara

[31] Mohammad Noor, "Haji dan Umroh", Jurnal Humaniora dan Teknologi. Vol. 4. No. 1, 2018.
[32] Wawancara penulis dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia pada 10 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpenduduk muslim lainnya. Kuota jemaah haji terbanyak kedua diperoleh Pakistan, dilanjut Negara India dan Bangladesh dan juga Mesir, namun dengan banyaknya warga negara dan jumlah pendaftar setiap tahunnya menjadikan kuota yang sudah ditetapkan masih kurang untuk Indonesia.[33]

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai pemegang otoritas Masjidil Haram dan Kota Mekah mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji, penentuan jumlah kuota haji juga termasuk dalam kewenangan tersebut. Berdasarkan dari hasil kesepakatan KTT OKI 1987, Kerajaan Arab Saudi berwenang dan berkewajiban untuk membagi dan menentukan jumlah kuota jemaah haji setiap negara. Setelah itu, setiap negara berwenang untuk membagi jumlah kuota jemaah haji yang sudah diberikan sesuai wilayah masing-masing daerah.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kuota jemaah haji adalah warga negara yang menganut Agama Islam dan telah mendaftarkan diri dengan tujuan menentukan ibadah haji yang memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran dan memenuhi rukun, syarat wajib maupun syarat sunah dan semua syarat sahnya menunaikan ibadah haji. Jemaah haji yang berasal dari Negara Indonesia yang dilayani pada setiap penyelenggaraan haji ke Arab Saudi. Dalam peraturan Menteri Agama (PMA), kuota

[33] Japeri, "Pengaruh Kuota Terhadap daftar Tunggu Naik Haji Kota Padang", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2. No. 1. 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jemaah haji merupakan batasan jumlah jemaah haji Negara Indonesia yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan yang sudah disepakati pada OKI.[34]

C. National Interest

National Interest atau disebut juga kepentingan nasional merupakan kepentingan negara dalam memenuhi kebutuhan yang dapat dilihat dari kondisi internalnya seperti kondisi politik, ekonomi, militer, maupun sosial budayanya. Konsep ini digunakan juga untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional. *National Interest* merupakan konsep suatu negara dalam melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara di dunia. Konsep ini adalah pilar utama politik luar negeri yang realistis karena *national interest* menentukan tindakan politik suatu negara.[35]

Menurut Hans J. Morghentau, *national interest* merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. *National interest* setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain yang bisa diciptakan dengan kerjasama.[36]

---

[34]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Pasal 1 tentang kuota haji.

[35] Ken Kiyono, "A Study on the Concept of the National Interest of Hans J. Morgenthau: as The Standart of American Foreign Policy", Naosite 49: 1-20. 1969.

[36] Hans J. Morgenthau, "*Another Great Debate: The National Interest of the United States*", Washington, 1952. Hal. 973.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

National Intereset setiap negara meliputi berbagai hal seperti keutuhan nasional, melindungi martabat nasional negara serta membangun kekuasaan.[37] *National Interest* suatu negara timbul akibat kurangnya sumber daya nasional atau kekuatan nasional, sehingga negara atau bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasionalnya dengan keluar dari batas-batas negaranya.[38] Berdasarkan konsep *national interest* tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah laku serta tindakan yang diambil oleh pemimpin politik terhadap masalah-masalah dalam negeri mupun internasional dipengaruhi oleh kepentingan nasional mereka terhadap masyarakat internasional.

Setiap negara di dunia pada umumnya memiliki tujuan untuk memajukan dan mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya. Tujuan tersebut meliputi upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, baik secara keseluruhan maupun individu dapat dicapai melalui jangka pendek maupun jangka panjang. Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia interasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis dalam tataran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses pencapaian kepentingan tersebut. Untuk mencapai tujuan negara, maka diperlukan strategi yang matang.

---

[37] Carlton, Clymer Rodee Dkk, "*Pengantar Ilmu Politik*", PT Raja Grafindo Persada, Jkarta, 2000, hal. 501-5-4.

[38] Tulus Warsito, "*Teori-Teori Politik Luar Negeri Relevansi dan Keterbatasannya*", Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998, hal.29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepentingan Indonesia sendiri adalah menambah jumlah kuota haji yang masih minim sehingga membuat daftar tunggu (*waiting list*) pemberangkatan calon jemaaah haji sangat lama. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai kepentingan penambahan kuota haji tersebut dengan cara berdiplomasi kepada Kerajaan Arab Saudi agar menambah kuota haji bagi Indonesia dengan cara menyampaikan langsung melalui pertemuan pemerintah maupun dengan penandatanganan perjanjian antar kedua pemerintahan.

D. *Multitrack Diplomacy*

Konsep diplomasi sendiri terus-menerus berkembang, pada era ini disebut diplomasi tradisional dan diplomasi moderen. Aktor dari diplomasi moderen yaitu presiden atau menteri karena diplomasi tradisional berkaitan dengan kegiatan kenegaraan, diplomasi tradisional umumnya hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dan aman. Proses diplomasi tradisional yaitu dilakukan dengan mengacu pada protokoler kenegaraan atau secara formal, sedangkan pada diplomasi moderen mengalami perkembangan yang membuat cakupan semakin luas. Pada diplomasi moderen, aktornya bukan hanya negara melainkan organisas atau badan usaha, pebisnis, kelompok hingga individu. Selain aktor yang mengalami perkembangan, maka pokok pembahasan dalam diplomasi ikut berkembang yaitu tidak hanya tentang kemanan dan perdamaian, melainkan juga membahas berbagai objek seperti halnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Proses diplomasi moderen juga sangat berbeda yaitu tidak melalui protokoler kenegaraan yang kaku.[39]

Penulis memfokuskan pada diplomasi multi jalur atau *multitrack diplomacy* yang merupakan salah satu bagian diplomasi. Jhon McDonald dan Louise Diamond berpendapat bahwa konsep diplomasi memaparkan tentang adanya proses perdamaian dunia pada sistem internasional melalui penggabungan antara dipolamasi pemerintah, kelompok, maupun individu.[40] *Multitrack diplomacy* adalah pengembangan paradigma dari diplomasi *first track* dan *second track*. Diplomasi jalur pertama yaitu interaksi resmi pemerintah, sedangkan diplomasi jalur kedua yang aktornya non negara atau selain negara, *multitrack diplomacy* menggunakan semua aspek diplomasi dari tingkat individu hingga tingkat negara.[41]

Diplomasi diartikan seni berorganisasi yang dilaksanakan oleh satu negara dengan negara lain. Sedangkan, para pakar diplomasi mengatakan bahwa diplomasi memiliki arti yang luas yang sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan zaman, non negara juga dianggap menjadi aktor dalam berdiplomasi, seperti halnya organisasi atau kelompok bahkan individu.[42] Dalam berdiplomasi terdapat konsep yang disebut *multitrack diplomacy*, McDonald dan Dioamond

---

[39] Jhon W. McDonald, "*Multitrack Diplomacy*", Alrington: The Institute for Multitrack Diplomacy. 2012. Vol.3. Hal. 67-68.

[40] Mahyar Diani, "*Strategi Multitrack Diplomacy Dalam Kerjasama Ekonomi Industri Korea Selatan (ROK) Terhadap Indonesia Tahun 2006-2012*", Skripsi, Jakarta: Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah. Hal. 18, diakses dalam FISP.pdf.diakses pada 18 Juni 2020.

[41]IMTD Institute for Multitrack Diplomacy: Improving System, improving lives, what is multitrack diplomacy, http:/imtd.org/abaout/what-ismulti-track-diplomacy/ diakses pada 18 Juni 2020.

[42] Barston, R.P, 1997, Modern Diplomacy, Pearson Education, England, hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa diplomasi adalah sesuatu yang bertujuan agar dapat mencapai perdamaian dengan cara *soft power* serta dengan cara memanfaatkan jalur pemerintah, kelompok maupun individu.[43] Jadi, konsep *multitrack diplomacy* ini dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, melainkan dari pihak non negara seperti kelompok, individu bahkan kepercayaan.

Pemerintah Indonesia memiliki *grand strategy* dalam berdiplomasi dengan program yang berbentuk kebijakan *multitrack diplomacy*. Diplomasi multi jalur atau *multitrack diplomacy* merupakan perwujudan dari negosiasi yang dilakukan aktor, baik secara formal maupun informal dengan melibatkan banyak pihak, aktor diplomasi tidak hanya pemerintah dengan pemerintah namun pihak swasta juga terlibat. Dalam sebuah hubungan internasional, diplomasi adalah sebuah jalan keluar dengan cara bernegosiasai atau praktik *lobbying* suatu permasalahan atau konflik suatu negara dengan negara lain dalam menyelesaikan konflik atau masalah untuk mencapai kepentingan nasional secara damai. Negara dapat memilih model diplomasi seperti apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah maupun untuk mencapai kepentingan nasionalnya tergantung yang dibutuhkan. Melalui konsep *multitrack diplomacy* pelaksanaan diplomasi dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya :[44]

---

[43] Diamond and McDonald (1991) dalam Sartika Soesilowati. "*Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan.*" Jurnal Global dan Strategis, Th.9,No.2, Juni-Desember 2015.

[44] Ambasador Jhon McDonald, ret. "The Institute for Multitrack Diplomacy", journal of conflictology. Vol. 3. No. 2. 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

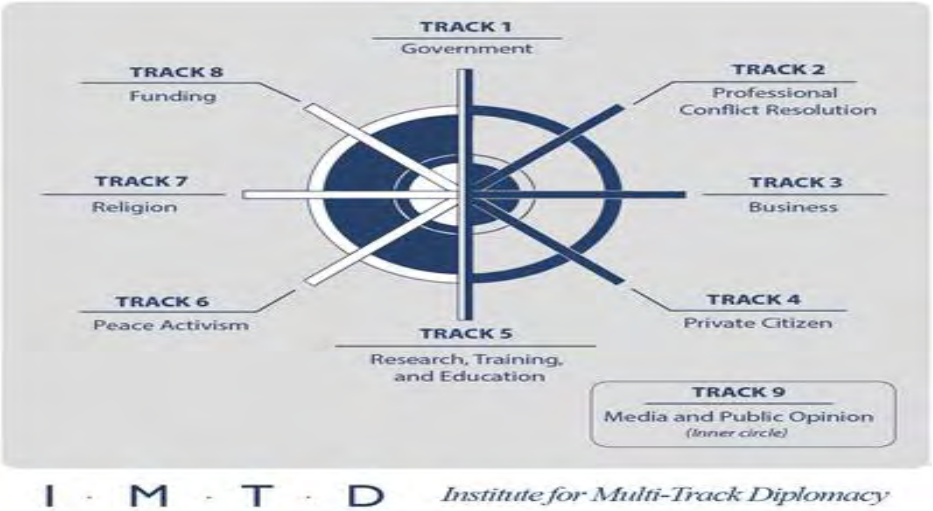

Gambar 2.1: *Ring Multi Track Diplomacy*

Sumber: *Institute for Multitrack Diplomacy*

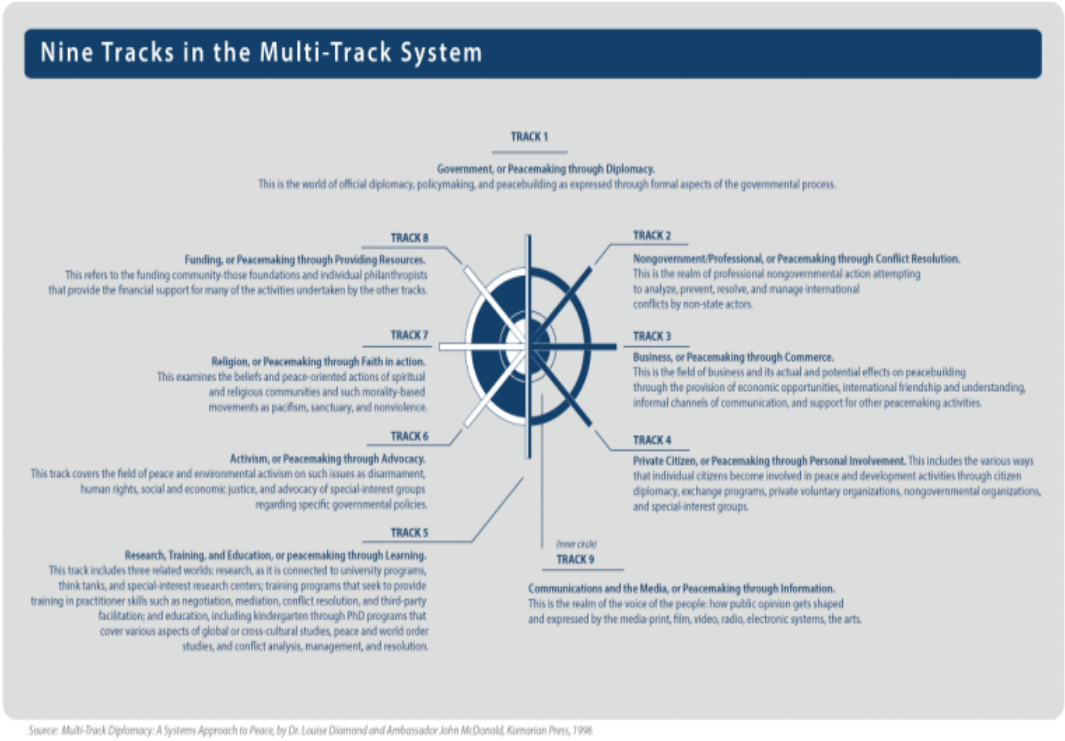

Gambar 2.2: *Multi Track Diplomacy Definition 9 track*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: *Institute for Multitrack Diplomacy*

Track 1 Goverment, jalur ini semua permasalahan akan diselesaikan dengan cara diplomasi resmi, pembuat kebijakan, pembangunan perdamaian melalui protokol kenegaraan, entah itu dari lembaga-lembaga pemerintahan baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Track 2, **Non Goverment/profesional or peace making trough conflict resolution**, diplomasi jalur kedua ini dilakukan oleh non pemerintah atau profesional, aktor bertindak secara profesional sesuai kemampuan masing-masing. Dengan keahliannya, aktor dapat berpartisispasi dalam perdamaian internasional. Aktor melakukan analisa, pencegahan, menyelesaikan dan mengelola konflik internasional.

Track 3, **Business or peacemaking through commerce**, jalur ketiga ini membahas tentang aktivitas bisnis. Adanya kegiatan bisnis dapat mempengaruhi manajemen konflik internasinonal. Perusahaan yang mengembangkan bisnisnya ke luar negeri seringkali berurusan dengan pemerintah lokal, organisasi, masyarakat sipil bahkan rezim internasional. Jalur ini juga menciptakan perdamaian melalui jalur bisnis dan perdagangan. Dampak baik dari jalur diplomasi ini adalah penyediaan peluang ekonomi, investasi dan kerjasama di bidang ekonomi.

Track 4 Private citizen, or peacemaking through personal involvement, pembuat perdamaian melalui adanya keikut sertaan individu. Jalur ini berkaitan dengan banyak cara agar tiap-tiap warga negara dapat ikut serta pada aktivitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian internasioanl serta pembangunan melalui kegiatan diplomasi. Program pertukaran, organisasi sukarela swasta, organisasi non-pemerintah, dan kelompok yang memiliki kepentingan khusus. Sebagai individu, aktor dapaat terlibat dalam berbagai kegiatan dan berbagai program, baik dalam program pendidikan, budaya, kesehatan dan sebagainya.

Track 5 Research, **Training and education or peacemaking through learning**, pada jalur ini adanya penelitian, pelatihan, serta pendidikan, atau penciptaan perdamaian melalui pendidikan. Pada jalur iniada tiga bagian yaitu penelitian, karena berhubungan dengan programn unit pendidikan seperti universitas maupun lembaga penelitian, lembaga *think tank*, dan pusat penelitian minat khusus. Program pelatihan untuk mengasah keterampilan seperti negosiasi, resolusi konflik, mediasi serta fasilitas pihak ketiga dan pendidikan melalui program PhD serta mencakup berbagai aspek global, studi perdamaian, tatanan dunia, analisis konflik, menejemen dan resolusi.

Track 6, **Activism or peacemaking through advocacy**, pada jalur keenam ini mencakup pada bidang perdamaian serta aktivis pada isu seperti hak asasi manusia (HAM), pelucutan senjata, keadilan sosial dan ekonomi, dan advokasi oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Para aktivitas dianggap sebagai kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa.

Track 7 Religious or peacemaking through faith in action, jalur ketujuh ini membahas tentang aspek keagamaan atau kelompok agama dan kepercayaan. Jalur ini membahas tentang keyakinan atau kepercayaaan serta tindakan yang berorientasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian dari komunitas spiritual dan religius serta gerakan berbasisi moralitas seperti pasifisme, suaka, serta tanpa adanya kekerasan. Pada masing-masing agama meyakini bahwa kepercayaan kepada agama berperan penting dalam kegiatan perdamaian karena agama dapat mempengaruhi dan memberikan ajaran filosofis kepada para penganutnya.

Track 8, **Funding or peacemaking through providing resources**, *funding* atau pendanaan yaitu aktivitas yang memfasilitasi jalannya kegiatan *multitrack diplomacy*. Jalur ini berperan penting karena kegiatan diplomasi dan perdamaian memerlukan dana, pendanaan diberikan kepada institusi, organisasi maupun kelompok bahkan individu yang sesuai dengan visi-misi pemeberi dana.

Track 9 Communications and the media or peacemaking through information, pada jalur ini berkaitan erat dengan komunikasi terhadap masyarakat luas. Media memiliki peran yang sangat penting untuk menyampaikan isu-isu seputar perdamaian, kerjasama internasional dan lain-lain, media massa juga dapat membentuk opini publik yang dapat dislurkan menjadi sebuah film, video, radio, sistem elektronik maupun seni.

Berdasarkan gambar yang sudah ditampilkan dan pemaparan di atas, maka dapat dilihat jalur atau *track* yang dapat dilalui dalam proses diplomasi, yaitu pemerintah, profesional atau bukan pemerintah, bisnis, masyarakat maupun individu, peneliti, aktivis, tokoh-tokoh agama, pemodal atau investor dan juga media masa dapat melalui sosial media. Dengan adanya jalur pada konsep *multitrcak diplomacy*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampilkan aktor-aktor yang bervariasi dalam hubungan internasional serta dapat mempengaruhi proses *lobbying* antar negara.

Terdapat dua jalur dalam konsep *multitrack diplomacy* yang akan dipakai untuk menganilis penelitian ini yaitu jalur pemerintah dan jalur agama. Seperti topik dalam peneitian ini, strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dalam penambahan kuota haji pada tahun 2019. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bapak Achmad Rizal Purnama, diplomasi penambahan kuota jamaah haji dilakukan pada level tertinggi (kepala negara) dan dari jalur agama adalah Nahdlatul Ulama melalui Komnas Haji dan Umroh.[45]

1. *First Track Diplomacy*

Jalur yang sudah lama digunakan oleh negara-negara di dunia adalah jalur pertama yaitu upaya diplomasi yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah atau disebut juga *government to government* yang merupakan elemen penting dalam kegiatan diplomasi. Diplomasi jalur pertama dilakukan dengan cara memepertimbangkan aspek formal mengikuti protokol kenegaraan karena aktor utamanya adalah presiden sebagai kepala negara atau diplomat profesional serta wakil-wakil yang diberikan kepercayaan oleh negara berdaulat melalui mediasi, negosiasi, intervensi, serta resolusi konflik.[46] Dalam *Global Conflict the Domestic Sources of*

[45] Wawancara dengan Achmad Rizal Purnama Selaku Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 13 Februari 2020.

46 Louise Diamond, John McDonald, *"Multi-track diplomacy : a systems approach to peace"*, (America: Kumarian Press, 2003), hlm. 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

International Crisis, Jhon W. Burton membagi diplomasi menjadi dua yaitu *first track diplomacy* dan *second track diplomacy*. First track mengacu pada pembuatan kebijakan dan pihak-pihak yang berkonflik dalam mencapai keinginanan yang dipilih dan memecahkan masalah yang alot. *Second track* mengacu pada interaksi yang tidak resmi atau informal negara-negara maupun kelompok-kelompok yang memiliki tujuan mengembangkan strategi untuk mempengaruhi opini publik dan mengorganisir serta menyelesaikan konflik yang alot.[47]

Jalur pertama atau *first track* dilakukan oleh negara yang resmi mematuhi protokol dan aturan kenegaraan disebut juga diplomasi tradisional. Diplomasi ini sebagai acuan dalam membuat kebijakan atau *peacmaker* dan pembuat perdamaian yang dilakukan dengan aspek pemerintahan. Diplomasi state to state mengacu pada diplomasi ini karena jalur pertama menjadi kebutuhan primer negara dalam menentukan kebijakan luar negeri dan meningkatkan hubungan terhadap negara lain. Diplomasi jalur pertama memungkinkan *exercise of power* negara dalam memepengaruhi arah negosiasi. Adanya kemajuan globalisas dan perubahan masa, hubungan antar negara menjadi lebih komplek tidak hanya dengan kepala negara saja melainkan dengan pihak-pihak non negara seperti kelompok bahkan individu, maka dari itu diplomasi lama atau disebut juga diplomasi tradisional banyak melakukan penyesuaian karena tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan yang ada.

---

[47] Jhon W. Burton, "*Global Conflict: The Domestic Sources of International Crissis*", Brigton: Wheatsheaf Books, 1984. Hal. 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan antara negara dan kelompok semakin meningkat, tidak lagi terkekang batasan fisik seperti batas negara dan lain-lain serta tidak hanya berfokus pada politik saja sehingga diplomasi tidak sepenuhnya dikelola dan dijalankan oleh aktor negara.[48]

Pelaksanaan diplomasi yang dilakukan pemerintah juga dipengaruhi oleh pembuat dan penetapan kebijakan luar negera. Pelaksanaan diplomasi juga dapat memberikan manfaat bagi sumber daya manusia atau aktor individu sehingga dapat memberikan kebebasan dalam membuat kebijakan sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya. Maksud dari diplomasi jalur pertama atau *first track* ini yaitu proses saat melakukan kegiatan diplomasi, membangun suatu perdamaian dengan membuat kebijakan melalui proses diplomasi resmi secara formal mengikuti protokol pemerintahan. Penerapan diplomasi jalur ini dapat dilihat dari bagaimana cara pendekatan sistem perdamaian, jalur ini dapat membentuk perdamaian politik melalui *political rebuilding*, serta pembangunan infrastruktur negara dan juga lembaga-lembaga internasional merupakan salah satu fungsi pemerintahan untuk pembangunan ekonomi dan *peace institusi*.[49]

Di era yang sudah sangat maju ini, diplomasi juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena juga adanya isu-isu dalam hubungan internasional yang kompleks. Hubungan internasional juga tidak lagi dipandang hanya sebagai hubungan

---

[48] Wehrenfennig, Daniel. 2008. "*Multi-Track Diplomacy and Human Security. Human Security Journal*", Vol. 7, pp. 80-86.

[49]Louise Diamind dan Jhon McDonald, "Multitrack Diplomacy: A System Approuce to Peace", thrid edition. New York: Kumarian Press. 1996. Hal. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar negara namun juga mencakup hubungan antara masyarakat internasional. Dengan demikian, tentu saja tidak efektif jika hanya menggunakan diplomasi tradisional atau *first track diplomacy* karena semakin banyak dan kompleksnya aktor yang dijangkau tidak hanya antar negara, melainkan kelompok, organisasi bahkan hingga individu.

2. *Seventh Track Diplomacy*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan juga *sevent track diplomacy* dalam menganilis penelitiannya. Sevent track diplomacy atau jalur agama ini membahas tentang keyakinan merupakan hal mendasar yang dapat mempengaruhi perilaku setiap penganutnya atau aktor.[50] Bagi penganutnya, agama merupakan hal yang paling penting dalam kesehaarian, hal itulah yang dapat digunakan oleh negara saat melakukan kegiatan diplomasi untuk mencapai tujuan dan kebijakan luar negerinya. Agama dapat menjadi pemersatu bagi semua umat yang menganutnya, selain itu agama juga menjadi pendamai saat konflik dan dalam agama terdapat prinsip yang dapat meredakan perselisihan.[51]

Jalur yang ketujuh atau jalur agama ini sebenarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui *praxis* kepercayaan. Agama atau kepercayaan berperan sebagai suatu kegiatan yang berorientasi dan memiliki kecenderungan dalam memperjuagkan perdamaian dunia melalui komunitas spiritual

[50] Lilik Salamah U, "*Negosiasi Dan Diplomasi",*. Surabaya: Cakra Studio Global_strategis Publisher, 2015.

[51] IMTD Institute for Multi-Track Diplomacy: Improving Systems, improving Lives, *What is Multi-Track Diplomacy*, http:/imtd.org/about/what-ismulti-track-diplomacy/ diakses pada 19 Juni 2020. Hal. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan religius serta terdapat gerakan yang berbasis moral seperti halnya *pacafisme*, *santuary* dan anti kekerasan. *Pacafisme* merupakan kepercayaaan bahwa resolusi konflik menggunakan jalur damai adalah jalan yang sangat benar, sedangkan *santuary* yaitu tempat yang dianggap suci dan dapat melindungi seseorang yang menganut dan memepercayainya.[52]

Jalur Agama dianggap hal yang berperan dalam mencapai perdamaian melalui praksis kepercayaan, agama mendorong orang untuk melayani umat dan tidak perang atau apapun yang dipandu dalam Agama Islam. Agama atau kepercayaan adalah sesuatu yang bersifat universal dan meluas sehingga pengaplikasiannya dilakukan dengan cara tidak terhalang lintasan batas negara tanpa terhalang batas-batas fisik kenegaraan. Dalam praktik diplomasi agama ini adalah dengan melakukan diplomasi atas dasar ketuhanan. Diplomasi agama merupakan diplomasi yang menggunakan aspek agama atau kepercayaan seperti maupun ide, slogan, serta simbol, bahkan juga organisasi keagamaan sebagai alat untuk dapat mencapai kepentingan nasional dalam urusan internasional.[53]

---

[52]McDonald, John W. 2003. "*Multi-TrackDiplomacy*", Tersedia dalam: http://www.beyondintractability.org/essay/multi-track-diplomacy. [Diakses pada 24 Oktober 2020.

[53] Alieja Curanovic, "*Religion In Russia's Foreign Policy*", New Estern Europe: 2013, diakses dalam http:/www.newwasternerope.eu/interviewes/812-religion-inrussia-s-foreign-policy. Diakses pada 19 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diplomasi jalur ketujuh yaitu agama membahas tentang keyakinan dan upaya perdamaian dunia melalui komunitas agama.[54] Peneliti dari *Institute of International Relations* yang bernama Alicja Curanovic menyatakan bahwa diplomasi agama dalam karya yang berpa buku *The Religion factor in Russia's Foreign Policy: Keeping God on Our Side*. Pada buku tersebut dijelaskan bahwa diplomasi agama merupakan kegiatan negara yang menggunakan faktor agama atau kepercayaan untuk menentukan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu semua rangkaian kerjasama negara dan kelompok keagamaan untuk kepentingan dalam negerinya yang ditetapkan secara pragmatis. Penggunaan kegiatan internasional, intuisi keagmaan, ide-ide dan simbol-simbol agama dan lain-lain.

Pendekatan jalur *religious* atau agama ini juga dipakai dalam diplomasi penambahan kuota jemaah haji karena selain Indonesia adalah negara yang penganut Islam terbesar di dunia, ulama Indonesia melakukan pertemuan langsung dengan Raja Salman saat berkunjung ke Indonesia diharapkan mampu untuk semakin mempererat hubungan kedua negara dan terealisasinya permohonanan penambahan kuota jamaah haji tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.

[54] IMTD Institute for Multi-Track Diplomacy: Improving Systems, improving Lives, *What is Multi-Track Diplomacy*, http:/imtd.org/about/what-ismulti-track-diplomacy/ diakses pada 19 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekaatan kualitatif dihasilkan dari pemikiran ilimiah sebelum hasil penelitian ditujukan sebagai ilmu pengetahuan. Penelitian kualitatif dilaksanakan dengan cara mengamati fenomena yang ada serta fakta sosial yang terjadi di lapangan. setelah itu hasil pengamatan dianalisis menggunakan teori maupun konsep sesuai dengan apa yang diamati di lapangan, sehingga terbentuklah jawaban atau argumnetasi sementara dari pengamatan .[55]

Pengertian penelitian kualitatif yang dikemukakan para ahli yaitu Lex J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang biasa digunakan dalam menggambarkan sejarah objektif terhadap suatu masalah dan atau konflik. Kualitatif ini dari sudut pandangnya menggunakan teori substantif semua berasal dari data.[56] Data kualitatif bukan berupa angka, melainkan berupa kata-kata dan juga gambar. Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan, dokumentasi, observasi, pengambilan gambar, dokumen resmi, rekam suara, video dan lain-lain.

---

[55] Burhan Bungin. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*". (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012) Hal. 6,

[56] Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2000), 5 – 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian kualitatif dalam buku yang ditulis oleh Conny R. Semiawan memaparkan tentang kualitatif adalah pendekatan dan penelusuran agar dapat dipahami tentang gejala-gejala yang terdapat dilapangan. Hasil dari penelitian kualitatif adalaah berupa teks narasi, kemudian data tersebut diolah selanjutnya dianaalisis, adapun analisisnya berupa deskripsi atau gambaran.[57]

Dalam penelitian strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji pada tahun 2019, penulis menggunakan jenis pendekaatan kualitatif deskriptif, sehingga dalam penelitian ini menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata atau narasi tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati oleh penulis, selain itu penulis juga menampilkan gambar-gambar. Data-data yang ditampilkan penulis dalam penelitian ini berupa dokumen wawancara, observasi, pengambilan gambar, dokumentasi pribadi, catatan narasumber, dan juga dokumen resmi.[58] Penggunaan kualitatif deskriptif pada penelitian penulis agar lebih memudahkan penulis dalam menganalisis fenomena atau konflik yang dibahasa pada penelitian peneliti menggunakan pemaparan data-data yang telah ditemukan oleh peneliti.

Penelitian kualitatif diapat juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan penelitian yang menggambarkan pola pikir induktif dalam membuat kesimpulan dari sesuatu yang diteliti. Berfikir induktif merupakan cara peneliti dalam mencari

[57] Conny R. Semiawan, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta:Grasindo, 2010), hal. 7.
[58] Laxi Maleong, "*Metode Penelitian Kualitatif"*, (Jakarta: Rosda Karya, 1994), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan setelah penelitian dan pengolahan data.[59] Penggunaan pendekatan tersebut, penulis mendapatkan gambaran sesuai dan komplit pada strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji pada tahun 2019 yang disusun mengunakan cara berfokus pada proses serta pencarian makna dibalik fenomena atau konflik dalam penelitian yang sudah ditentukan, dengan harapan agar informasi yang dikaji bersifat komperhensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya.

B. Tingkat Analisis

Tingkat analisis merupakan metode yang dipakai penulis pada saat menganalisis hubungan internasioanl. Pendapat dari Mochtar Mas'oed bahwa *level of analysis* atau tingkat analisis berguna untuk menganalisis fenomena yang diteliti disebabkan oleh banyak faktor, sehingga penulis dapat melihat faktor apa saja yang sangat sentral atau dominan dan juga bisa memperkecil tingkat salah pada saat berargumentasi.[60] *Level of analysis* berfungsi agar pemilihan faktor utama yang akan menekan dalam menganalisis masalah, karena tidak semua memiliki pengaruh yang signifikan dalam sebuah peristiwa atau fenomena yang diteliti. *Level of analysis* juga bisa difungsikan menekan adanya kemungkinan hal-hal kurang tepat yang terjadi pada metode penelitian. Berbagai bentuk kesalahan metode sendiri dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu kesalahan dalam berargumentasi bahwa generalisasi

[59] John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Terjemahan. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015),61

[60] Mochtar Mas'oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan tindakan "bagian" yang biasanya bisa juga digunakan pada saat menguraikan "keseluruhan" serta bagian kedua yaitu kesalahan akibat memakai generalisasi yang ditarik pada tingkat "keseluruhan" dipakai menjelaskan tingkat "bagian".[61] Menurut Mochtar Mas'oed terdapar lima tingkat analisis diantaranya individu, perilaku kelompok atau organisasi, negara, pengelompokan negara-negara dan sistem internasional. Dalam penelitian ini, penulis memakai tingkat analisis negara-bangsa, tingkat analisis negara menekankan pada internal negara yang berpengaruh dalam membuat dan mengatur kebijakan luar negeri serta mampu membentuk dan menghambat pilihan-pilihan kebijakan luar negeri.[62]

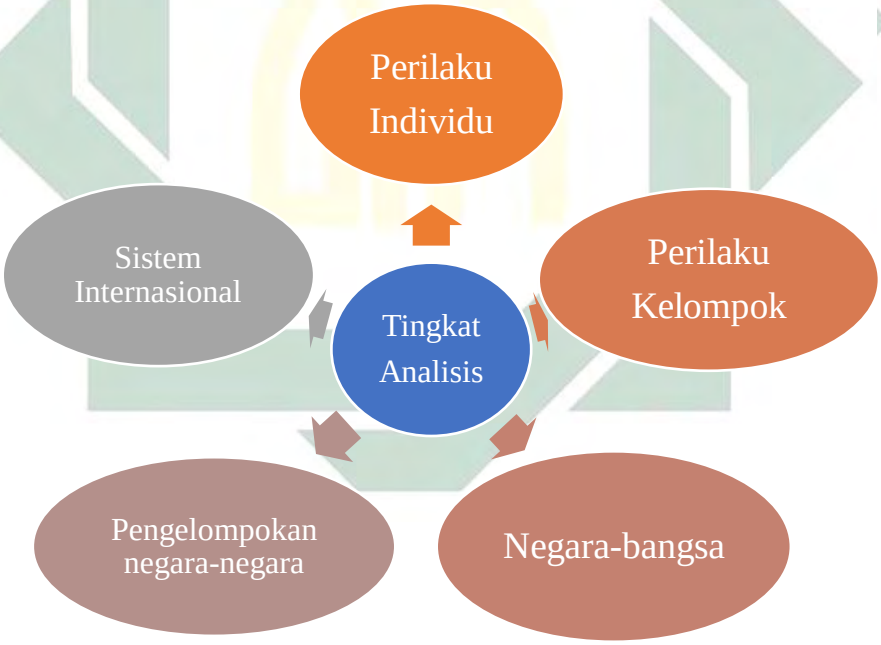

[61] Mochtar Mas"oed, Op.cit.

[62] John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Terjemahan. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1: *Level of Analysis*[63]

Sumber: Mochtar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional*: Disiplin dan metodologi

Jhon Rouke berpendapat mengenaik *level of analysis* yaitu didalam hubungan internasional bahwa fenomena hubungan internasional memiliki tiga tingkat analisis yaitu, *individual level analysis* atau tingkat analisis individu yang memfokuskan kepada manusia sebagai aktor yang berperan serta berpemgaruh untuk merumuskan dan membuat suatu kesepakatan atau kebijakan, *system level analysis* atau disebut juga tingkat analisis sistem yang dapat diperankan sebagai *pressure* eksternal bisa berpengaruh pada kebijakan di negara tersebut, *state level analysis* disebut juga tingkat analisis negara yang difokuskan kepada konteks struktur politik yang disebut negara, didalam membentuk kebijakan pemerintahan.[64]

Peneliti berfokus pada tingkat analisis yaitu pada level tertinggi yaitu negara atau bangsa. Tingkat analisis negara atau bangsa menghasilkan penjelasan yang tidak terlalu melebar dan luas seperti analisis sistem, namun juga tidak terlalu sempit seperti tingkat analisis individu.[65] Penulis membagi menjadi dua variabel pada penelitian ini, pertama menggunkan variabel independen atau penjelas yang terlihat jelas pada langkah-langkah diplomatis digunakan langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, kedua yaitu menggunakan variabel dependen yaitu terlihat

[63] Mochtar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional*: Disiplin dan metododlogi, 40

[64] John T. Rourke, and M. A. Boyer. 2010. International politics on the world stage BRIEF. Chapter 3:55-79.(8th ed). New York: McGraw-Hill Higher Education.

[65] Yessi Olivia, SIP,MIntRel. *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional.* (Jurnal Transnasional: Vol. 5 No. 1). Hlm. 899

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ditambahnya jumlah calon jemaah haji menggunakan analisis negara. Pada tingkat analisis negara, penulis memfokuskan penelitian pada pemerintah, instansi atau lembaga yang ikut serta dalam membuat suatu kebijakan luar negeri maupun ikut membantu dalam proses kegiatan diplomasi penambahan kuota haji atau kelompok-kelompok dari pembuat keputusan negara.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara atau *interview* dengan narasumber yang telah ditentukan, kajian dokumen, dan penelusuran data *online*. Pemakaian metode oleh penulis untuk pengumpulan data tentang strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia digunakan untuk penambahan kuota jemaah haji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara *snowball*, dimana wawancara ini menemukan narasumber kunci secara berantai atau menggelinding untuk mendapatkan informasi.

Wawancara akan dilakukan di Kementrian Agama Republik Indonesia untuk narasumbernya yaitu Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh serta Direktorat Jenderal Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kajian dokumen dilakukan dengan meneliti naskah-naskah lama seperti Peraturan Menteri Agama (PAM) tentang aturan dalam menunaikan ibadah haji, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen pemerintah atau swasta. Studi dokumen merupakan pelengkap dan penguat dari penggunanan metode observasi dan wawancara dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kualitatif.[66] Sedangkan penulusuran data *online* dilakukan dengan menelusuri web resmi Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri maupun lembaga negara lainnya, artikel atau jurnal di internet dan berita-berita *online* yang terpercaya.

Penelitian ini didukung oleh data primer dan sekunder. Terlihat dari cara memperolehnya, data primer iyalah data yang didapat dari objek penelitian, dan data skunder iyalah data yang diperoleh dengan wujud ada seperti data yang berbentuk dokumen dan publikasi.[67] Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara online dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. dan Direktorat Jenderal Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sementara data skunder diperoleh dari *website* resmi pemerintah atau swasta, buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel, berita, dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data. Yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

[66] *Ibid*, 326
[67] Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

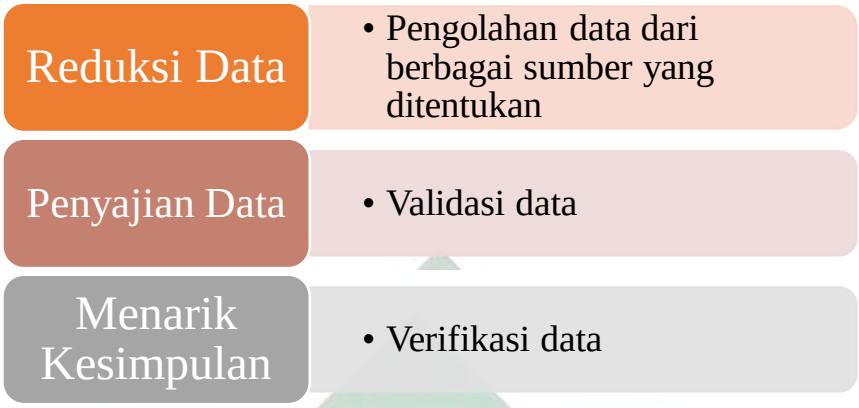

Bagan 3.2 Teknik Analisis Data

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono. *Penelitian Kualitatif, dalam Metode Penelitain Kombinasi*

1. Reduksi data

Melalui teknik reduksi data ini, peneliti memilih hasil catatan dari lapangan, penyederhanaan data disebut juga merangkum, pengabstrakan, mentransformasikan data awal yang disebut reduksi data. Saat bagian ini dilakukannya pengelompokan data yang sesuai dengan penelitian yang diambil. Pada proses ini, hanya data yang relevan dengan penelitian saja yang direduksi. Mereduksi data berarti merangkum dan memilah pokok data, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dibutuhkan peneliti dalam mencari jawaban rumusan masalah.[68]

[68] Miles dan Huberman dalam Sugiyono. *Penelitian Kualitatif, dalam Metode Penelitain Kombinasi.* (Bandung: Alfabeta, 2018), 336

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya akan ditampilkan dalam penelitian. Penyajian data ditujukan untuk menggabungkan informasi dan data yang telah diperoleh sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan. Pada penelitian kualitatif deskriptif data yang disajikan akan dilakukan dengan cara menguraikan data dengan teks deskriptif atau narasi. Penyajian data dilakukan sebelum menari kesimpulan, Huberman membatasi penyajian data yang telah tersusun. Menurut Miles dan Huberman penyajian data yaitu *"the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narative text",*[69] yaitu penyajian data dengan metode penelitian kualitatif lebih banyak bersifat naratif.

3. Membuat Kesimpulan

Penulis melakukan verifikasi pada menentukan kesimpulan. Dalam kesimpulan mengandung pemaknaan atas data yang kompetensi validitasnya atau keasliannya sudah teruji.[47] Dalam menarik kesimpulan pada penelitian kualitatif mengunkan suatu hasil yang baru dan pada sebelumnya tidak ada atau belum diteliti, hasil yang baru dapat berupa deskripsi maupun narasi atau gambaran terhadap obyek pada sebelumnya tidak adanya kejelasan sehingga akan lebih jelas.[70] Penarikan kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian Strategi diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji pada tahun 2019.

---

[69] *Ibid*, 339
[70] *Ibid*, 343

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan kegiatan penelitian di Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan (Perpusda) Surabaya Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Surabaya. Selanjutnya penelitian dengan wawancara secara online atau dikirim melalui *email* peneliti oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak non negara yaitu Bapak Mustholih Siradj Ketua Komnas Haji dan Umroh. Penelitian ini dimulai sejak tanggal 16 Desember 2019.

F. Tahap-Tahap Penelitian

A. Michael Huberman dan Matthew B. Miles yang kemudian diterjemahkan oleh Tjejep Rehendi R. yang berjudul Analisis Kualitatif menjelaskan tentang tahapan-tahapan pada penelitian sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

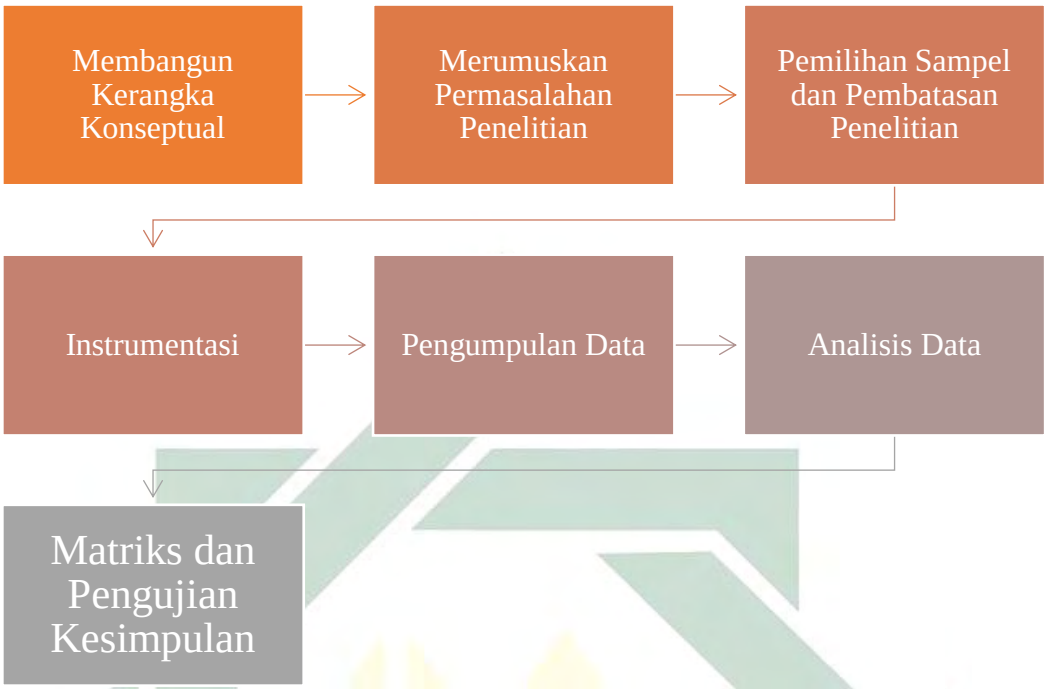

Gambar 3.3: Tahap-tahap Penelitian[71]

Sumber: Matthew B. Miles dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku sumber Tentang Metode-metode Baru*. Dalam Asep Suryana M. Pd. *Tahap-tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif*.

G. Teknik Pengujian Data

Dalam pengujian kevalidan atau keabsahan data kualitatif terdapat beberapa metode berikut:

[71] Matthew B. Miles dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku sumber Tentang Metode-metode Baru*. Dalam Asep Suryana M. Pd. *Tahap-tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UIP). Hlm. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

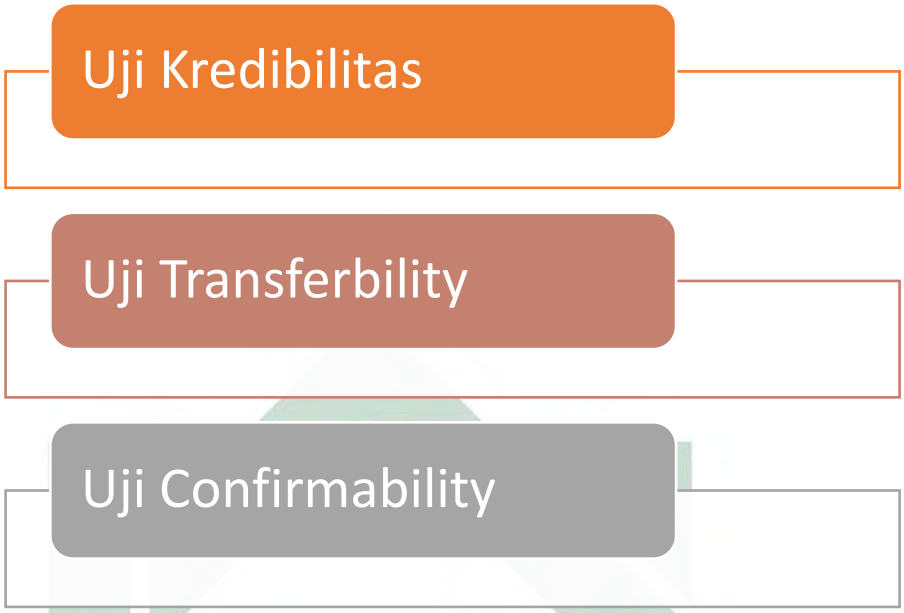

Gambar 3.4 Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif[72]

Sumber: Sugiyono. *Penelitian Kualitatif* , dalam "*Metode Penelitian Kombinasi".* (Bandung: Alfabeta,

1. Uji Kredibilitas

Beberapa upaya untuk menguji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

[72] Sugiyono. *Penelitian Kualitatif* , dalam "*Metode Penelitian Kombinasi".* (Bandung: Alfabeta, 2018), 365

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

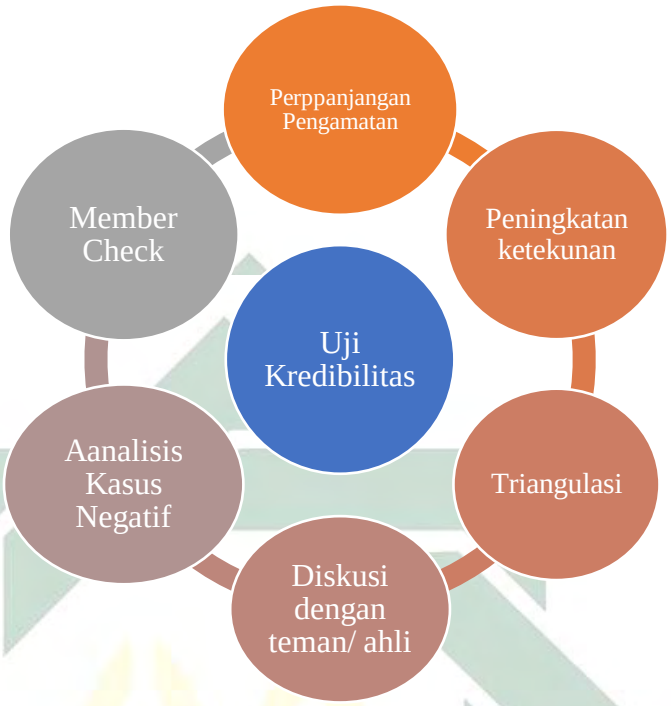

Gambar 3.5: Uji Kredibilats

Penulis menggunakan beberapa uji kredibilitas dalam penelitian ini seperti di bawah ini:

a. Meningkatkan Ketekunan

Penulis menjelaskan dengan runtut, teliti serta berkesinambungan. Penulis juga mengelompokkan sumber-sumber bacaan dan mempersiapkan teks wawancara untuk mendapat data penelitian kemudian akan diteliti untuk memastikan apakah data hasil penelitian kredibel atau tidak. Untuk menambah ketekunan adalah penulis mencari dan membaca serta memahami berbagai buku serta referensi-referensi, hasil penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya, dan dokumen yang memiliki kaitnya persialan temuan peneliti.[73] Upaya peneliti dalam menajamkan pengetahuan adalah dengan cara membaca dan mencermati referensi buku maupun dokumen penting terkait penelitian sehingga bisa digunakan untuk memeriksa data apakah dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan atau tidak.

b. Pengecekan Sejawat atau Ahli Melalui Diskusi

Setelah dilaksanakannya pengamatan dan penelitian, penulis berdiskusi tentang yang didapat saat penelitian dengan dosen pembimbing, serta narasumber terkait penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai isu yang bahas. Disini peneliti juga melakukan diskusi dengan teman-teman. Hal seperti ini betujuan untuk mendapatkan pengakuan bahwa penelitian ini benar adanya.

c. Kecukupan Referensi

Dalam pelaksanaan tahap tersebut peneliti menggunakan referensi yang cukup dan bisa dipercaya. Melalui wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian sehingga peneliti mendapatkan data primer untuk mendukung keabsahan data. Selain itu peneliti juga menggunakan referensi dari buku, artikel, jurnal dan berita sebagai data sekunder untuk mendukung penelitian.[74]

---

[73] *Ibid*, 368-369
[74] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Triangulasi

Sugiyono mengatakan tentang triangulasi dalam tahapan pengujian kredibilitas memiliki arti penelaahan data yang diperoleh dari sumber-sumber telah dihasilkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menyantumkan tiga triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber.[75]

I. Triangulasi Teknik

Dalam penelitian ini, penulis menguji kredibilitas data melalui pemverifkasian data pada sumber-sumber yang diperoleh dengan tahapan-tahapan dan teknik berbeda. Sebagai contoh adalah penulis mengecek data melalui wawancara serta pengambilan gambar saat wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan. Jika ada perbedaan dalam data yang diperoleh, maka penulis melakukan rapat dengan metode tanya jawab lanjutan mengenai sumber data hingga ditemukan hasil yang validitasnya terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan.[76]

II. Triangulasi Waktu

Penulis juga menguji kredibilitas data melalui segi waktu, seperti yang dilakukan penulis dalam wawancaranya pada saat waktu narasumber sedang longgar atau beristirahat diharapkan dapat menjelaskan data kredibel serta valid dikarena narasumber dalam kondisi yang tidak tertekan pekerjaan. Setelah itu bisa juga menggunakan waktu dan situasi yang beda saat mengecek wawancara dan hal lainya

[75] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Elfabeta, 2007), 273.
[76] Ibid., 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dilakukan secara berulang kali diharapkan dapat menghasilakn data yang sesuai dan bisa dipertanggung jawabkan.[77]

III. Triangulasi Sumber

Dalam penelitin ini, penulis juga menggunakan pengujian kredibilitas data yang dilakukan pengecekan ulang data yang didapat dilakukan dari berbagai sumber. Setelah penulis diperoleh data, kemudia memasuki proses analisis sehingga penulis dapat menarik kesimpulan lalu penulis melakukan pengecekan kembali sumber data.[78]

1. Pengujian *Transferability*

Pada tahap ini, penulis melakukan penerapan hasil penelitian supaya dapat dipahami oleh pembaca. Penulis harus memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis dan valid. Sehingga pembaca dapat memahami secara jelas dan dapat menerapkan hasil penelitian ini di tempat lain secara baik.[79]

2. Pengujian *Depenability*

Pada tahapan ini penulis mengaudit keseluruhan proses penelitian. Dari beberapa masalah yang terjadi di lapangan, dimana penulis tidak terjun ke lapangan namun tetap bisa mendapatkan data. Oleh karena itu, penulis melakukan audit terhadap keseluruhan penelitian, mulai dari menentukan rumusan masalah penelitian, terjun ke lapangan, menentukan sumber data yang valid, sampai pada menarik kesimpulan dari data yang sudah diolah dan dianalisis.[80]

---

[77] Ibid.,274.
[78] Ibid., 274.
[79] *Opcit*, 373
[80] *Opcit*, 374

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengujian *Confirmability*

Ketiga yaitu penulis juga melakukan pengujian *confrimability*. Pada uji *confirmability* ini, penulis melakukan pengujian pada hasil penelitian dan setelah itu dicocokan pada tahapan disaat penelitian. Sebagaimana hasil penenelitian merupakan fungsi atas tahapan penelitian, maka penelitian ini bisa dikatakan memenuhi standarisasi *confirmability*.[81]

[81] Opcit, 374

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan penambahan kuota jemaah haji sebanyak 10.000 jemaah hingga meningkatkan akomodasi dan inisiatif rute Mekah yang lebih baru.[82] Mendapatkan kuota haji sebanyak itu tentunya melalui proses diplomasi yang panjang antara Indonesia dengan Arab Saudi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai pemegang otoritas dan yang berwenang atas wilayah Masjidil Haram di Kota Mekah, Arab Saudi mempunyai wewenang luas untuk dapat mengatur penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Otoritas yang dimiliki Kerajaan Arab Saudi termasuk dalam menentukan kuota calon jemaah haji untuk tiap-tiap negara di seluruh dunia.selanjutnya berdasarkan keputusan di KTT OKI 1987 di Amman Yordania, Kerajaan Arab saudi berwenang untuk membagi serta menentukan jumlah kuota jemaah haji pada tiap-tiap negara dan setiap negara juga berwenang membagi lagi jumlah kuota yang sudah ditetapkan sesuai porsi masing-masing wilayah.

Negara Indonesia sebagai negara yang paling banyak diberikan kuota jemaah haji dibandingkan dengan negara lain. Pembagian kuota mengacu pada jumlah umat muslim yang ada di tiap-tiap negara serta mengacu pada ketetapan KTT OKI 1987di Yordania. Selain Negara Indonesia, terdapat negara-negara yang mendapatkan kuota jemaah haji dengan jumlah besar karena jumlah penganut muslim yang banyak dan

[82] Wawancara penulis dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia pada 10 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah pengirim jemaah haji setiap tahunnya besar pula. Negara-negara tersebut yakni Negara India, Negara Pakistan, Bangladesh, serta Negara Mesir.[83]

a. Negara Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang selalu mengirim jemaah haji terbanyak dibanding dengan negara lain. Pada tahun 2019, Negara Indonesia mendapat penambahan kuota jemaah haji sebanayak 10.000 jemaah dari Kerajaan Arab saudi sehingga kuota Indonesia menjadi 231.000. Dari jumlah total kuota jemaah haji Indonesia, sebanyak 212.520 jemaah dialokasikan untuk jemaah reguler dan 18.480 untuk jemaaah haji jalur khusus.[84]

b. Pakistan

Kuota jemaah haji Pakistan adalah sebanyak 179.210 jemaah, jumlah tersebut masih sangat jauh dibandingkan dengan negara Indonesia. Sebanyak 107.526 dialokasikan kepada jemaah haji reguler dan 71.684 jemaah untuk haji jalur khusus yang mendaftar melalui organisasi swasta di Negara Pakistan.[85]

c. India

Pada tahun 2017 lalu, sekitar 170.025 umat muslim India mengunjungi Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Pada tahun berikutnya, Kerajaan Arab Saudi

[83] Lima Negara dengan Kuota Haji Terbanyak di Dunia, https://www.cnnindonesia.com. Diakses pada 19 September 2020.
[84] Japeri, loc. cit.
[85] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan 5.000 kuota tambahan untuk jemaah India, sehingga jumlahnya menjadi 175.025 ribu. Alokasi kuota jemaah haji reguler dan khusus di India juga berbeda-beda setiap tahunnya. Biasanya India memberangkatkan sekitar 70 persen jemaah dari kuota tahunan, sementara 30 persen kuota diberikan pada agensi swasta.[86]

d. Bangladesh

Bangladesh menjadi negara keempat yang mendapatkan kuota haji dalam jumlah besar dari Kerajaan Arab Saudi. Pada 2017 lalu, sekitar 127.198 umat muslim Bangladesh mengunjungi Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Di tahun berikutnya, kuota haji yang dijatah untuk Bangladesh masih sama. Namun, hanya 127.158 yang berangkat. Hingga 2019, kuota jemaah haji asal Bangladesh yang berangkat masih sama sehingga tidak ada penambahan dari pemerintah Saudi. Namun, Sekretaris Kabinet Khandker Anwarul Islam mengatakan tahun ini akan ada tambahan 10 ribu kuota untuk Bangladesh.[87]

e. Mesir

Mesir menempati posisi kelima yang mengirimkan jemaah haji terbanyak. Pada tahun 2017 lalu, sekitar 108.000 penganut muslim di Negara Mesir mengunjungi Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jumlah jamaah haji asal Mesir jumlahnya justru berkurang di tahun-tahun berikutnya. Pada 2018, hanya sekitar 80

[86] Ibid.
[87] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ribu jemaah asal Mesir yang melaksanakan haji. Memasuki 2019, jumlahnya kembali menyusut menjadi hanya 76 ribu jemaah asal Mesir.[88]

Negara Indonesia menjadi negara yang selalu mengirim jemaah haji terbanyak tentunya melalui proses diplomasi yang sangat panjang antara Negara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Namun kuota yang diberikan belum mencukupi karena jumlah penduduk dan pendaftar haji di Indonesia sangat banyak sehingga calon jemaah haji yang telah mendaftarkan diri belum tentu bisa beragkat melakukan ibadah haji pada tahun itu juga melainkan harus menunggu bertahun-tahun.[89] Beberapa upaya yang dilakukan Negara Indonesia dalam melobi Pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia sehingga bisa menanggulangi daftar tunggu yang sangat lama, berikut daftar tunggu jemaah haji di Indonesia:

NO.	WILAYAH	KUOTA	TAHUN	JUMLAH PENDAFTAR
1.	Aceh	4298	2050	125224
2.	Sumatera Utara	8168	2039	148886
3.	Sumatera Barat	4525	2042	97159
4.	Riau	4957	2042	107029
5.	Jambi	2858	2048	77536

[88] Ibid.

[89] *Witing List* Ibadah Haji Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh www.haji.kemenag.go.id diakses pada 10 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Sumatera Selatan	6890	2040	135899
7.	Lampung	6915	2040	134395
8.	DKI Jakarta	7766	2044	183556
9.	Jawa Tengah	29786	2048	809275
10.	D.I. Yogyakarta	3084	2049	86581
11.	Jawa Timur	34516	2050	1031240
12.	Bali	686	2045	16902
13.	Nusa Tenggara Barat	4412	2053	143629
14.	Nusa tenggara Timur	656	2041	13499
15.	Kalimantan Tengah	1581	2044	36951
16.	Kalimantan Selatan	3746	2055	127729
17.	Sulawesi Utara	700	2035	10177
18.	Sulawesi Tengah	1958	2040	38571
19.	Sulawesi Tenggara	1984	2043	45228
20.	Papua	1056	2042	23002
21.	Bangka Belitung	1045	2043	23204
22.	Banten	9279	2044	214999
23.	Gorontalo	959	2035	13866
24.	Kepulauan Riau	1268	2039	24069

Tabel 4.1: *Data Jumlah dan Daftar Pemberangkatan Jemaah Haji di Indonesia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Witing List Ibadah Haji, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh haji.kemenag.go.id[90]

A. Diplomasi Melalui *Track Goverment*

Indonesia merupakan negara yang selalu berusaha keras untuk mencapai kepentingan nasionalnya di dunia internasional dengan jalur politik yang berbentuk kegiatan diplomasi dengan negara yang dituju. Melalui kegiatan diplomasi, Pemerintah Indonesia menjalin dan menjaga hubungan bilateral dengan negara-negara lain agara tidak ada konflik dan perselisihan yang dapat memancing pertentangan dan konflik senjata militer. Negara Indonesia dan juga Kerajaan Arab Saudi merupakan negara besar dengan yaoritas menganut agama islam. Hubungan merupakan dua negara besar yang menjalin hubungan dengan baik terkait beberapa kerjasama dan isu yang melibatkan kedua negara, salah satunya adalah isu tentang haji.

Di Negara Indonesia minat ibadah haji umat muslim sangat tinggi, hal seperti ini dapat dilihat dengan panjangnya antrian daftar tunggu haji di Indonesia, karena kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi tidak seimbang dengan banyaknya minat jemaah haji Indonesia. untuk dapat meningkatkan kuota haji, Pemerintah Indonesia menjadi peran utama yang paling penting dalam melakukan lobi kuota haji terhadap Arab Saudi. Pemerintah yang paling mudah mempunyai akses untuk meminta kuota langsung dari pihak Arab Saudi.

[90] *Witing List* Ibadah Haji Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh www.haji.kemenag.go.id diakses pada 10 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bebagai lobi politik Pemerintah Republik Indoesia kepada Pemerintah Arab Saudi agar memenuhi permintaan penambahan kuota haji sangat susah, mengingat penentuan kuota haji telah ditetapkan oleh ketentuan 1:1000. Rumus Proporsionalitas penambahan kuota haji dalam merealisasikan kuota sepermil atau seperseribu dari total populasi muslim pada setiap negara saat ini harus ditinjau ulang dan direvisi serta harus disesuaikan dengan kondisi penganut muslim semakin meningkat dan pendaftar haji semakin banyak. Penambahan kuota haji adalah wewenang Pemerintah Arab Saudi, mengingat penambahan kuota haji harus rasional dengan melihat kondisi Mina yang sudah ada batasan-batasannya. Berikut adalah upaya pemerintah melalui *government track* untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agara menambahan kuota jemaah haji bagi Indonesia tahun 2019 dan seterusnya.

1. Peretemuan Langsung Kepala Negara

Berbagai upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji salahsatunya yaitu pertemuan langsug oleh kepala negara, upaya tersebut merupakan diplomasi level tertinggi karena dilakukan lagsung oleh kepala negara. Presiden Joko Widodo melakukan kujungan ke Negara Arab Saudi pada tanggal 11 sampai 12 Sepetember 2015, dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo bertemu langsung Raja Arab Saudi untuk melobi pemerintah Arab Saudi dalam penambahan kuota Jemaah haji bagi Indonesia namun Pemerintah Arab Saudi belum bisa menjawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung permintaan Presiden joko Widodo dikarenakan Masjidil Haram masih dalam proses renovasi. [91]

Permintaan penambahan kuota haji Presiden Joko Widodo terjawab dengan kunjungan Raja Arab Saudi yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia pada Bulan Maret Tahun 2017 yaitu pengembalian kuota haji sejak pengurangan dua puluh persen dan juga peningkatan kuota jemaah haji Negara Indonesia mulai tahun 2017. Kuota jemaah haji Negara Indonesia sudah kembali ke jumlah normal, yang semula 168.800 manjadi normal sejumlah 211.000 jemaah. Selain adanya pengembalian kuota jemaah haji menjadi normal, Kerajaan Arab saudi juga menyetujui tambahan kuota jemaah haji untuk Negara Indonesia sebanyak 10.000 jemaah. Jadi total kuota haji Indonesia tahun 2017 ialah 221.000 jamaah haji. Dengan adanya tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jamaah sehingga total kuota jemaah haji Indonesia bertambah hingga 231.000 jemaah pada tahun 2019. Indonesia berharap Arab Saudi dapat menambahkan kembali kuota haji Indonesia untuk tahun berikutnya. Dengan adanya kuota sebanyak itu, jumlah kuota haji Indonesia adalah kuota haji terbanyak di dunia.[92]

[91] Wawancara penulis dengan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bpk. Achmad Rizal Purnama pada 13 Februari 2020.

[92]*Distribusi Jatah Haji Arab Saudi*, Sumber: http:/www.alaraby.co.uk/amp//society/ diakses pada 19 Mei 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1: *Pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud*

Sumber: Pertemuan Empat Mata Presiden Joo Widodo dengan Raja Salman bin Abdul Aziz (Bogor, Jawa Barat, 2017)

Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo dan Raja Arab Saudi yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz kembali mengadakan pertemuan bilateral di Istana *Al-Qasr Al-Khas* pada tahun 2019. Pada pertemuan anatar kepala negara tersebut, Presiden Joko Widodo dan Raja Salman bin Abdul Aziz berbincang tentang masalah kerja sama antara kedua negara yang terus ditingkat dibidang ekonomi dan pariwisata. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasi dari masyarakat Indonesia terhadap penambahan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 10.000 kuota.[93]

[93] Presiden RI Joko Widodo dengan Raja Salman bin Abdul Aziz bersepakat tingkatkan kerja sama, https://kemlu.go.id/portal/i/read/193/berita/ diakses pada 11 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.2 Pertemua Bilateral Presiden Indonesia dengan Raja Arab Saudi

Sumber: Presiden Jokowi kembali bertemu dengan Raja Salman membicarakan kerja sama di bidang ekonomi dan pariwisata di Istana *Al-Qasr Al-Khas.* (Riyadh, 14 April 2019).

2. Penandatanganan MoU Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan

Selain Presiden Joko Widodo yang menyampaikan langsung permohonan penambahan kuota jemaah haji, diadakan pertemuan menteri dari kedua negara. Pada pertemuan tersebut hadir banyak menteri yang ikut menandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Terdapat sebelas perjanjian yang berhasil dicapai oleh Negara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga disepakati dalam bentuk nota kesepahaman. Berikut adalah sebelas nota kesepahaman yang dicapai Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

1. Kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab saudi tentang peningkatan pimpinanan sidang komisis bersama.
2. Kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi mengenai budaya antara Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan dan Informasi Kerajaan Arab Saudi.
3. Program kerjasama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Otoritas Usaha Kecil dan Menengah Kerajaan Arab saudi mebahas tentang pembangunan usaha kecil dan menengah.
4. Kesepakatan dan perjanjian antara Kementerian Kesehaatan Republik Indonesiaa dengan Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang kerjasama kesehatan.
5. Nota Kesepahaman antara penerbangan Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.
6. Kerjasama antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Kemeterian Pendidikan Kerajaan Arab saudi dlam bidang saintifik dan pendidikan tinggi.
7. Kesepakatan antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kementerian Urusan Islam, Dakah dan Bimbingan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang urusan islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang kerjasama kelautan dan perikanan.
9. Program kerjasama dalam bidang perdagangan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan Investasi Kerajaan Arab Saudi.
10. Kesepakatan dalam pemberantasan antara Kepolisisan Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab saudi.
11. Kesepakatan mengenai kontribusi pendanaan Arab saudi terhadap pe,biayaan proyek pembangunana antara Saudi *Fund for Development* dengan pemerintah Republik Indonesia.[94]

Dalam Pertemuan tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin juga menandatangani MoU haji Indonesia pada 4 Januari 2017. Menteri agama juga menyampaikan langsung untuk pengalihan kuota Jemaah haji negara tetangga ke Indonesia.[95] Dalam pertemuan tersebut, Menteri Lukman Hakim Syaifuddin membahas mengenai nota kesepahaman yang berisi tujuh pokok kesepakatan.

a. Jumlah kuota jemaah haji Indonesia adalah 231.000 jemaah haji yang dialokasikan untuk kuota jemaah haji reguler sebanyak 212.520 dan haji khusus sebanyak 18.480 jemaah.

[94] Nota Kesepahaman Indonesia dengan Arab saudi saat Kunjungan Raja Salman, www.setneg.go.id. Diakses pada 11 November 2020.

[95] Wawancara penulis dengan Direktur jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia pada 10 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penambahan penyediaan konsumsi jemaah haji selama di Kota Mekah, hal ini dimaksudkan dalam rangka pemenuhan konsumsi terutama pada hari-hari sebelum pelaksanaan wukuf dan hari-hari setelah *nafar tsani*.

c. Dalam pertemuan tersebut Menteri Lukman hakim mengusulkan kebijakan yang disebut dengan *Fast Track* atau jalur cepat, yang tahun lalu sudah diterapkan kepada 70.000 jemaah yang berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta. Kebijakan tersebut dapat memudahkan jemaah haji karena tidak perlu lagi mengantri dalam jangka waktu yang sangat lama untuk melewati proses imigrasi di Bandara Jeddah maupun Imigrasi Madinah.

d. Memperluas program kepulangan (*iyyab*) bagi jemaah haji Indonesia. Program *iyyab* adalah layanan *Fast Track* pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi. Pada tahun 1440H, Pemerintah Arab Saudi menerapkan program *Iyyab* untuk sebagian kloter jemaah haji Indonesia yang menggunakan maskapai Saudi Airlines.

e. Peningkatan kualitas pembinaan manasik haji. Pembinaan kepada calon jemaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah serta masyarakat, baik dilakukan dengan cara individu maupun dengan cara pembentukan kelompok bimbingan ibadah haji. Pembinaan tersebut diarahkan agar terciptanya kemandirian jemaah haji, baik kemandirian dalam ibadah maupun perjalanan haji maupun pemahaman dalam manasik haji.

f. Penguatan profesionalitas petugas melalui pola rekruitmen yang professional, transparan dan akuntabel serta pelaksanaan pembekalan petugas secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komperhensif dalam rangka membentuk petugas yang mempunyai komitmen dan kompetensi dalam melayani para tamu Allah.

g. Rencana penggunaan Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji bagi jemaah haji Jawa Barat pada masa operasional haji tahun 1441H/2020M.[96]

Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Bapak Lukman Hakim Syaifuddin serta Menteri Haji dan Umroh Kerjaan Arab Saudi yaitu Muhammad Salih bin Taher Bentin telah bertanda tangan terkait *Ta'limatul Hajj* atau pakta kerjasama penyelenggaraan haji 2019.[97] Pada kesempatan ini pula, digunakan Negara Indonesia dalam menyampaikan beberapa usulan untuk meningkatkan layanan jemaah haji Negara Indonesia. Pertama yaitu *Fast Track* atau jalur cepat yang sudah diterapkan sebesar 70.000 jemaah yang melauli Bandara Soekarno Hatta dan diterapkan embarkasi Indonesia. *Fast Track* tersebut mampu memudahkan jamaah Indonesia karena tidak perlu mengantre lama lagi pada proses imigrasi di bandara yang sudah ditentukan.

Usulan baru tersebut selanjutnya diusulkan Menteri Lukman Hakim Sayifuddin yaitu berkaitan dengan pembuatan visa haji dan umroh yang harus melewati proses perekaman biometrik. Indonesia meminta supaya pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak menerapkan kebijakan tersebut dikarenakan akan menyulitkan calon jemaah

[96]" Pembukaan Rapat Kerja BPKH", kemenag.go.id, diakses pada Rabu, 5 Agustus 2020.

[97] Kementerian Agama RI. Menag Lukman Hakim Syaifuddin menandatangani MoU penyelenggaraan Haji tahun 2019 bersama Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab saudi https://twitter.com/kemenag_ri/status. Diakses pada Rabu, 5 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haji, karena kondisi geografis Negara Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau serta tersebar didalamnya. Kendala bagi Indonesia adalah calon jemaah haji yang tinggal di kota besar tetu tidak kesulitan untuk melakukan perekaman, namun bagi jemaah yang tinggal di pedalaman atau jauh dari pusat kota butuh waktu untuk ke kota sekedar rekam biometrik. Selain ada perpanjangan waktu, perekaman biometrik bisa dilakukan saat jamaah akan berangkat haji. Jadi bisa diterapkan di bandara-bandara titik keberangkatan, dengan demikian visa haji dikeluarkan dahulu tanpa harus ada perekaman biometrik. Usulan tersebut masih akan dibahas secara lebih detail pada level teknis.

Gambar 4.3: *Menteri Lukman Hakim Sayifuddin bersama Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi menandatangani MoU penyelenggaraan haji tahun 2019.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Menag RI dan Kerajaan Arab Saudi Menandatangani MoU pelaksanaan haji 2019.

(Jakarta, 11 Desember 2018)

3. Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Parlemen Arab Saudi

Pada tanggal 8 sampai 14 April 2019, adanya kunjungan kerja dari Pemerintah Republik Indonesia ke Arab Saudi. Pertemuan tersebut diwakili oleh Tamsil Linrung sebagai ketua GKSB Republik Indonesia, Iis Anisa, S.E dan Ufi Sanifah Azis sebagai sekretaris, dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR, Marwan Cik Asam, Eko Hendro Purnomo, S.Sos., KH. Muslich ZA. Ada tiga tujuan khusus pertemuan ini yaitu:[98]

a. Mempromosikan dan meningkatkan hubungan parlemen antara kedua negara, untuk saling berdiskusi tentang pandangan dan pengalaman tentang parlemen baik hubungan bilateral maupun multilateral seperti APA (*Asian Parlemantary Assembly*), Parlemen negara yang tergabung dalam OKI (PUIC) dan IPU (*Inter Parliamentary Union*).
b. Meningkatkan kerjasama parlemen serta mempromosikan nilai-nilai perdamaian dunia, menyuarakan Islam moderat yaitu islam yang ramah serta menghormati kebebasan berpendapat, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) serta membicarakan isu global yang menyangkut islam.

[98] Laporan Kunjungan Kerja Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Arab Saudi Tanggal 8-14 April 2019. Dpr.go.id. diakses pada 23 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mempererat kerjasama antara kedua negara seperti perdagangan, ekonomi serta investasi, energi, ketenagakerjaan, pendidikan, perhajian, sosial budaya dan juga pariwisata.

Ketua Delegasi GSKSB Tamsil Linrung mengemukakan beberapa hal yaitu mengharapkan Majelis Syura ikut mengupaykan penambahan kuota jemaah haji Negara Indonesia agar dapat mengurangi daftar tunggu keberangkatan ibadah haji, meminta Arab Saudi mempermudah proses pemberangkatan jemaah haji dari Negara Indonesia yang melaksanakan ibadah dengan menggunakan visa mujmalah, dan juga mengharapkan partisipasi delegasi Majelis Syura Arab Saudi pada forum WPFSD (*World Parlementary Forum on Sustainable Development*) yang akan dilaksanakan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.4: *Diskusi Delegasi GKSB dengan Majelis Syura*.

Sumber: Laporan Kunjungan Kerja GKSB DPR RI.

(Riyadh 8-14 April 2019)

Setelah menyimak pendapat dari Ketua GKBSB DPR RI, Majelis Syura memparkan tentang pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya. Pemerintah Arab Saudi sendiri sangat fokus dalam menangani tentang pelaksaan ibadah haji serta mengerahkan secara maksimal upaya-upaya penyambutan jemaah haji dan juga mengadakan evaluasi serta merencanakan untuk tahun berikutnya. Selain itu juga Pemerintah Arab saudi terus melakukan perbaikan fasilitas dalam pembangunan Masjidil Haram untuk kenyamanan jemaah haji. Pemerintah Arab Saudi membuka visa agar jemaah haji bisa lebih banyak datang ke Arab Saudi serta kepada warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi diberikan kesempatan untuk dapat mengundang anggota keluargnya untuk bisa menunaikan ibadah umroh dengan diberikannya visa umroh.[99]

4. Memohon Pengalihan Kuota Jemaah Haji Negara Filipina

Selain menyampaikan langsung untuk meminta penambahan kuota haji pada Pemerintah Arab Saudi, diperlukan terobosan baru dalam berdiplomasi Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara kawasan ASEAN dan berhubungan baik dengan Indonesia yang kuota hajinya tidak terpakai secara maksimal. DPR mengusulkan

[99] Laporan kunjungan Kerja Delegasi Grup Kerjasa Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Arab Saudi Tanggal 8 sd. 14 April 2019 pdf. www.dpr.go.id. Diakses pada 2 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Presiden Joko Widodo untuk memohon secara resmi sisa kuota jemaah haji Negara Filipina yang tidak terpakai untuk mengantisipasi semakin lamanya antrian calon jemaah haji dan dugaan adanya pemberangkatan haji ilegal yang melalui Negara Filipina. Dengan pengalihan kuota jemaah haji ke Indonesia menjadikan kuota haji yang tidak terpakai oleh negara Filipina bisa mengantisipasi kembali terjadinya masalah paspor palsu calon jemaah haji ilegal. Adanya jemaah ilegal dikarenakan banyaknya pendaftar haji yang tidak sebanding dengan kuota jemaah haji Negara Indonesia, sehingga muncul celah yang menjadikan terjadinya peluang oknum yang tidak bertanggung jawab memberangkatkan haji meggunakan kuota haji negara lain.[100]

Presiden Joko Widodo memohon penambahan kuota jemaah haji dari negara-negara tetangga yang kuota hajinya tidak terpakai dengan maksimal seperti Filipina, Jepang dll. Dengan begitu Negara Indonesia dapat menggunakan sisa kuota yang tidak terpakai setiap tahunnya untuk digunakan jamaah haji Indonesia. Sayangnya Pemerintah Arab Saudi tidak menyetujui pengalihan kuota haji dengan alasan tidak ada prosedur serta mekanisme untuk mengalihkan sisa kuota haji yang tidak terpakai. Arab Saudi beranggapan bahwa sisa kuota haji tersebut harus dikembalikan ke Arab Saudi agar dapat dipakai pada tahun berikutnya.[101]

Keinginan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan secara langsung kepada Presiden Filipin yaitu Rodrigo Duterte. Presiden Duterte menyambut baik permintaan

[100] Pemerintah diminta lobi negara tetangga, https://www.cnnindonesia.com/nasional. Diakses pada 27 Juli 2020.
[101] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalihan kuota jemaah haji yang tidak terserap secara maksimal. Presiden Duterte menyampaikan setuju dengan pengalihan kuota haji ini dikarenakan sebagai antisipasi terjadinya jamaah haji ilegal Indonesia yang berangkat haji melalui Filipina. Presiden Duterte menganggap bahwa jamaah tersebut adalah korban atas kurangnya jumlah kuota yang diberikan kepada Indonesia, sedangkan jumlah pendaftar haji setiap tahunnya selalu bertambah. Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo menegaskan bahwa pengalihan kuota haji dari Filipina ke Indonesia tersebut akan menggunakan prosedur dan kebijakan yang diterapkan pada tiap-tiap negara, sehingga tidak memunculkan permasalahan baru terkait tentang penyelenggaraan haji.[102]

Selain menyampaikan ke Presiden Filipina tentang pengalihan kuota haji ini, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan langsung dengan Pangeran Mohammed bin Salman pada saat menghadiri KTT G-20 Hangzhou. Karena bagimanapun yang berhak untuk menambah kuota jemaah haji adalah pemegang otoritas Kota Mekah dan Kota Madinah yakni Pemerintah Arab saudi dengan prosedur pengalihan kuota dan penambahan kuota haji.

[102] "Arab Saudi setuju penambahan kuota haji Indonesia" https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160911_indonesia_haji_saudi_kuota_tambahdiakses pada Kamis, 23 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

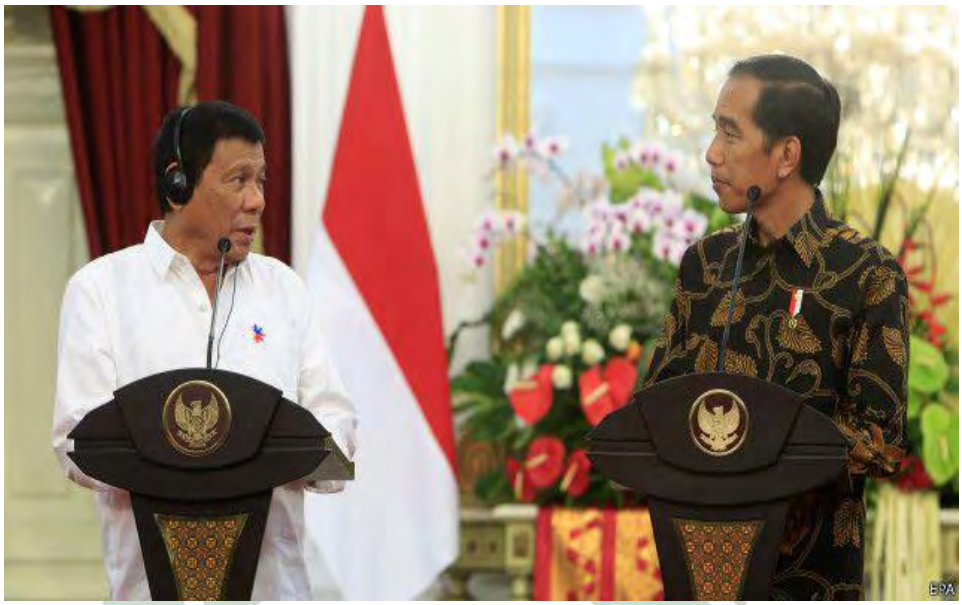

Gambar 4.5: *Keinginan pengalihan kuota haji disampakan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden Rodrigo Duterte.*

Sumber: bbc News Indonesia (*Jakarta, 12 September 2016*)

Kerjasama dengan negar-negaraa di kawasan ASEAN sangat penting karena setiap negara bisa saling membantu mengisi kuota haji negara yang kekurangan kuota jemaah haji. Alangkah lebih baiknya sisa kuota haji dialihkan ke Negara Indonesia yang membutuhkan kuota tersebut melalui kerjasama agar dapat mengurangi antrean jamaah haji serta mengantispasi adanya daftar tunggu yang lama dan jamaah haji illegal dari berbagai negara karena kurangnya kuota jamaah haji. Dari masalah tersebut, seharusnya bisa menjadi *warning* bagi pemerintah Indonesia agar dapat memperbaiki porsi kuota haji baik dengan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi seraya menata kembali pengelolaan haji Indonesia secara lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Diplomasi Melalui *Track Religious*: Peran Ulama' Dalam Melobi Kerajaan Arab Saudi

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas menganut Agama Islam dan setiap tahunnya mengirim jemaah untuk menunaikan rukun islam yang kelima, serta Negara Indonesia adalah negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi yang keduanya memiliki hubungan persahabatan baik dan telah terjalin cukup lama. Meskipun demikian, Indonesia memiliki permasalahan yakni kuota jemaah haji dan lamanya masa tunggu pemberangkatan haji, tidak terhitung banyaknya jumlah jemaah haji yang terpaksa harus menunggu hingga bertahun-tahun untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima ini. Negara Indonesia memeiliki kesamaan dalam budaya Islam sehingga diharapkan mampu untuk meyakinkan Arab Saudi agar menambah kuota jamaah haji 2019 bagi Indonesia.

Diamond dan McDonald menggambarkan lebih jauh jalur diplomasi sebagai sebuah roda yang dibagi lagi menjadi sembilan bagian yang cocok dengan isu-isu global di era sekarang.[103] Kesembilan bagian tersebut membentuk jalur-jalur yang saling bekesinambungan dan dari kesembilan jalur tersebut, agama atau disebut juga *track religious* adalah salah satunya. Eksistensi agama sebagai jalur ketujuh dalam diplomasi

[103] Louise Diamond dan Jhon McDonald, "Multitrack Diplomacy: A System Approace to peace", Third Edition. New York: Kumarian Press. 1996. Hal. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kian hari kian diperhitungkan. Banyak konflik di dunia saat ini yang memiliki komponen agama dan pada saat yang bersamaan, agama dapat juga menjadi bagian dari solusi untuk konflik yang peneliti bahas saat ini. Dalam prakteknya, diplomasi agama menggunakan aksi-aksi yang berorientasi perdamaian guna menyelesaikan konflik, diplomasi agama merupakan upaya oleh komunitas agama di seluruh dunia banyak denominasi untuk mengingatkan orang-orang bahwa agama dan sistem kepercayaan tidak didasarkan pada kekerasan dan perang. Tingkat keberhasilan diplomasi agama dilihat dari sejauh mana agama dapat menjembatani hubungan antar musuh menjadi lebih baik.

Dalam hal diplomasi agama, tentunya banyak yang membantu seperti keikut sertaan Ulama' Indonesia yang ikut serta melobi langsung Raja Salman bin Abdul Aziz untuk meningkatkan penambahan kuota haji serta meningkatkan tali persaudaraan tentang budaya maupun pemahaman Indonesia dengan Arab Saudi.[104]

Banyak tokoh muslim dari beberapa organisasi masyarakat yang memiliki banyak pengikutnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al-Irsyad, dan lainnya belajar ilmu agama di Arab Saudi, bahkan sejarah mencatat bahwa tokoh Islam yaitu Syaikh Junaid Al-Batawi, Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, serta Syaikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi pernah menjadi Imam besar Masjidil

[104] Wawancara peneliti dengan Wawancara penulis dengan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bpk. Achmad Rizal Purnama pada 13 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haram yang tentunya memiliki ikatan emosional sangat erat antara Indonesia dan Arab Saudi.[105]

Karena sudah adanya kaitan emosional dengan ulama' terdahulu, maka ada beberapa tokoh agama yang bertemu langsung dengan Raja Arab Saudi Salman pada saat kunjungan Raja Arab Saudi yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia pada Tahun 2017 yang lalu. Terdapat 37 tokoh ulama muslim yang ikut serta dalam undangan pertemuan bersama Raja Salman yang dilaksanakan di Istana Merdeka secara tertutup. Hanya ada tiga tokoh agama Islam yang berkesempatan menyampaikan pendapatnya kepada Raja Salam di antaranya yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin sekaligus mewakili NU, KH. Yunahar Ilyas yang mewakili Ormas Muhammadiyah, dan seorang habib dari Pekalongan yang bernama Habib Muhammad Luthfi.[106]

Para tokoh Islam menyampaikan ucapan syukur serta apreisasi atas kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz agar hubungan antara Arab Saudi dan Indonesia semakin terjalin dengan baik karena memiliki keterikatan iman. Persoalan haji juga diutarakan dalam pertemuan dengan Raja Arab Saudi Salman. Tokoh Islam berharap Kerajaan Arab Saudi dapat mempertimbangan untuk memberikan tambahan kuota haji bagi Indonesia mengingat besarnya animo masyarakat muslim Indonesia yang ingin

---

[105] Wawancara dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh, Bapak Mustholih Siradj. Pada 10 Juni 2020.

[106]"*Pimpinan Ormas Islam Bersama Raja Salman Bicarakan Persoalan Haji*", https://www.cnnindonesia.com/nasional. Diakses pada 27 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunaikan ibadah haji namun terhambat keterbatasan kuota haji yang telah ditentukan. Terdapat empat poin yang disampaikan oleh perwakilan ulama yaitu:

1. Menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia.
2. Kerjasama untuk melakukan upaya moderasi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan.
3. Kerjasama di bidang pendidikan dan pembangunan metode kesehatan.
4. Mempererat silaturahmi karena adanya ikatan akidah serta memohon penambahan kuota jemaah haji untuk Negara Indonesia.

Gambar: 4.6: *Pertemuan Raja Salman bersama Para Tokoh Islam di Istana Merdeka*.

Sumber: Kompas.com (*2 Maret 2017*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membahas mengenai diplomasi *religious track*, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk menganut Agama Islam menjadikan ulama maupun tokoh agama sebagai aktor yang sangat penting sehingga tidak dapat dipandang sebelah mata. Ulama atau tokoh agama memiliki posisi yang penting dalam berjalannya negara, tokoh agama sebagai *Balance Of Power* atau penyeimbang kekuasaan pemerintahan. Ulama juga berperan sebagai pengatur asumsi masyarakat dan perwakilan informal untuk masyarakat sekaligus pengontrol dalam pelaksanaan ajaran penguasa karena ulama sendiri sangat dihormati oleh pengikutnya, tokoh agama juga memiliki kemampuan stabilisator yang mempunyai kemampuan dalam menjadi penengah dalam masyarakat yang menjadi pengikutnya maupun antar negara.[107]

Track Religious digunakan oleh penulis untuk menganalisis penelitian karena adanya pertemuan langsung antara 37 ulama' dari Indonesia dengan Raja Salman bin Abdul Aziz, serta menyampaikan empat poin yang didalamnya terdapat permohonan penambahan kuota jemaah haji untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut merupaka salah satu strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam berdiplomasi kepada Raja Salman bin Abdul Aziz untuk dapat menambah kuota jemaah haji Indonesia.

[107] The Fall and Rise of the Islamic state, Feldman Noah, 2008, Jersey: Princeton University Press

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa strategi diplomasi penambahan kuota haji yang dilakukan Pemerintah Indonesia berhasil, dan akan selalu ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Strategi diplomasi yang digunakan Indonesia adalah *track goverment* dimana diplomasi ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan bertemu langsung antar kepala Negara Indonesia Yaitu Presiden Joko Widodo dengan Raja Salman bin Abdul Aziz, penandatanganan MoU antara dua pemerintahan, kunjungan kerja delegasi grup kerjasama bilateral (GKSB) DPR Republik Indonesia dengan Parlemen Arab Saudi, memohon penambahan kuota dari Negara Filipina dan *track religious* yaitu bantuan dari tokoh-tokoh agama dalam melobi penambahan kuota jemaaah haji. Sehingga pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 10.000, selain itu adanya upaya-upaya diplomasi yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Kerajaan Arab saudi untuk menambah kuota jemaah haji untuk tahun-tahun berikutnya.

B. Saran

Penelitian ini ditulis untuk menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia selalu mengupayakan penambahan kuota haji tidak hanya untuk tahun 2019 namun juga untuk tahun-tahun berikutnya. Mengingat banyaknya muslim Indonesia yang mendaftar haji pada setiap tahunnya sehingga daftar tunggu (*waiting list*) menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat lama. Dengan adanya hubungan yag terjalin baik dan sudah cukup lama, seharusnya Indonesia sangat mampu untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar menambah dan menyetujui pengalihan sisa kuota haji negara-negara tetangga yang tidak terserap secara maksimal.

Namun pada dasarnya, penambahan kuota haji dan pengalihan kuota memang sepenuhnya keputusan Arab Saudi mengingat Arab Saudi yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan haji dan sebagai penjaga dua kota suci. Kondisi Masjidil Haram dan destinasi keagamaan lainnya juga terbatas, tidak dapat menampung berjuta-juta jamaah haji namun tetap aman dan nyaman.

Peneliti sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada beberapa kekurangan. Minimnya referensi seperti buku, artikel, jurnal, yang membahas secara khusus mengenai strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam penambahan kuota jemaah haji tahun 2019 serta adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan proses wawancara kepada beberapa pohak harus terhambat. Penulis memiliki saran untuk pihak-pihak selanjutnya yang memiliki minat untuk meneliti topik terkait. Penulis menyarankan untuk para pembaca dan penstudi hubungan internasional untuk mewawancarai atau menggali informasi lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang belum sempat penulis wawancarai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Dokumentasi

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 29 tahun 2015 Tentang Penyelenggraan ibadah Haji Reguler

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibaadah Haji Reguler, Pasal 1 tentang kuota haji

Wawancara dan Diskusi

Nizar, Direktur jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada 10 Februari 2020.

Purnama, Achmad Rizal Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pada 13 Februari 2020.

Artikel, Jurnal dan Buku

Alieja Curanovic, *Religion in Russia's Foreign Policy,*New Estern Europe: 2013.

Anthony, W.P., Parrewe, P. L., dan Kacmar, K.M, *Strategic Human Resource Management. Second Edition,* Orlando: Harcourt Brace and Company, 1999.

Barston, R.P, Modern Diplomacy, England: Pearson Education, 1997.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Carlton, Clymer Rodee Dkk, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2000

Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Grasindo, 2010.

Creswell, John W. *Educational Research: Planning, Conducting Quantitative*. Merril: Universitas Michigan, 2002.

Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Terjemahan. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Diamond and McDonald (1991) dalam Sartika Soesilowati. Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan." Jurnal Global dan Strategis, Th.9,No.2, Juni-Desember 2015.

Diani, Mahyar. *Strategi Multi Track Diplomacy Dalam kerjasama Ekonomi Industri Korea Selatan (ROK) Terhadap Indonesia Tahun 2006-2012*, Skripsi, Jakarta: Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah.

Djelantik, Sukawarsisni. *Diplomasi Antara Teori Dan Praktik,* Yogyakarta:Graha Ilmu , 2008.

Elisabeth M. Monica dan Rosalyn Theodora. *Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/ Pekerja Migran Internasional Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018,* Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan. Vol. 11, No. 1, (2019).

Ernest Satow, Guide to Diplomacy Practice, Cambridge: 1957.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Falahi, Ziyad. *Prospek Regionalisme Timur Tengah Pasca-Arab Spring: Telaah terhadap identitas kolektif Liga Arab"* Jurnal Kajian Wilayah, vol. 3 no. 2, (2014).

Feldma, Noah, The Fall and Rise of the Islamic state, Jersey: Princeton University Press, 2008.

Haqqi, Halifa, dkk. "*Diplomasi Pemerintah Indonesia Kepada Arab Saudi Tentang Penambahan Kuota Haji Indonesia*". Vol. 1 No. 1. Ejurnal.unisri.ac.id.

Hinnebusch, Raymond. *The International Politics of the Middle East*, Manchester: Manchester University Press, 2003.

John T. Rourke, and M. A. Boyer. International politics on the world stage BRIEF. Chapter 3:55-79.(8th ed). New York: McGraw-Hill Higher Education. 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.

Kementerian Agama RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, 2010.

Louise Diamond, John McDonald, *Multi-track diplomacy : a systems approach to peace.* America: Kumarian Press, 2003.

Maleong, Laxi *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas'oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. 1994.

Mas'oed, Mochtar, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metododlogi, Jakrta, LP3ES, 1990.

Matthew B. Miles dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku sumber Tentang Metode-metode Baru*. Dalam Asep Suryana M. Pd. *Tahap-tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIP.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono. *Penelitian Kualitatif, dalam Metode Penelitain Kombinasi.* Bandung: Alfabeta, 2018.

Mohm. Mu'in, Perjuangan Diplomasi dan Politik Luar Negeri, Pustaka Azam, 1982.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhni, Ahmad "Diplomasi Pemerintah Indonesia Dengan Arab Saudi Dalam Meningkatkan Kuota Haji Indonesia", Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Munawir Ahmad. *Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji,* Makasar: skripsi Universitas Hasanudin, 2011.

Mustafa, Abd Rahman. *Era Baru Arab Saudi Melirik ke Timur*. Harian Kompas: 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ninda Ardiani, *Investasi Raja Salman di Indonesia dalam Pandangan Ekonomi Makro Islam,* Vol. 6, No. 1, (2018).

Olivia, Yessi SIP, MIntRel. *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional.* Jurnal Transnasional: Vol. 5 No. 1.

Putuhena, M. Shaleh. *Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: 2007.

Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rizqah, Fadhylatur Isdah. *Hubungan Bilateral Arab Saudi-Indonesia Di Era Pemerintahan Raja Salman Dan Jokowidodo*, Makasar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2018.

Roy, S.L. Diplomasi. Jakarta: PT. Grafindo Raja Perkasa, 1995.

Salamah, Lilik, *Negosiasi Dan Diplomasi.* (Surabaya: Cakra Studio Global_strategis Publisher, 2015.

Salwadi, Kevin Agatha. *Alasan peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia*, Jurnal Fis HI, (2017).

Saputro, Trianto. *Hubungan Diplomasi dengan Negara-negar Arab Pada Masa Pemerintahan Sukarno,* Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma, 2017.

Shoelhi, Mohammad, Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tulus Warsito, Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998.

Sugiyono. *Penelitian Kualitatif* , dalam *Metode Penelitian Kombinasi.* Bandung: Alfabeta, 2018.

Umar Husein, *Strategic Management in Action.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Wehrenfennig, Daniel. Multi-Track Diplomacy and Human Security. Human Security Journal, Vol. 7, 2008.

Yasinta Sigit, Ariqoh "Langkah Diplomatik Indonesia Terhadap Kerajaan Arab Saudi Dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji Indonesia", Skripsi Universitas Pmebangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2019.

Online

Lima Negara Dengan Kuota HajiTterbanyak di Dunia, httpps://www.cnnindonesia.com, (diakses pada 19 September 2020).

Arab Saudi setuju penambahan kuota haji Indonesia" https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160911_indonesia_haji_saudi_kuota_tambah (diakses pada Kamis, 23 Juli 2020).

Definisi Strategi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (diakses 8 Januari 2020), https://kbbi.web.id/strategi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikutip http:/aresearch.upi.edu/operator/upload/s_sej_0705418_chapter2(1).pdf. hal. 16, (daikses pada 18 Juni 2020).

Distribusi Jatah Haji Arab Saudi, Sumber: http:/www.alaraby.co.uk/amp//society/. (diakses pada 2 Desember 2019)

Distribusi Jatah Haji Arab Saudi, Sumber: http:/www.alaraby.co.uk/amp//society/ (diakses pada 19 Mei 2020).

Hossain, Sharoar. t.t. Application of Multi Track Diplomacy for Peace Building; a Case Study of Reconciliation Process of Post Kargil War. Tersedia di: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33359199/Application_of_Multi_Track_Diplomacy_for_Peace_Building__a_Case_Study_of_Reconciliation_Process_of_Post_Kargil, Diakses pada 21 September 2020.

http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/05/apakah-indonesiaadalah-negara-dengan-jumlah-masjid-terbanyak-di-dunia diakses pada 19 Mei 2020.

http://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/politisasi-arab-saudi-dankuota-haji-indonesia_57cfd3d240afbd8c68aa0047 diakses pada 11 Oktober 2019.

https://umroh.travel/kuota-haji-terbanyak/ Di akses pada tanggal 9 Oktober 2019.

IMTD Institute for Multi-Track Diplomacy: Improving Systems, improving Lives, *What is Multi-Track Diplomacy*, http:/imtd.org/about/what-ismulti-track-diplomacy/ (diakses pada 18 Juni 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IMTD Institute for Multi-Track Diplomacy: Improving Systems, improving Lives, *What is Multi-Track Diplomacy*, http:/imtd.org/about/what-ismulti-track-diplomacy/ (diakses pada 19 Juni 2020).

IMTD Institute for Multi-Track Diplomacy: Improving Systems, improving Lives, *What is Multi-Track Diplomacy*, http:/imtd.org/about/what-ismulti-track-diplomacy/ (diakses pada 19 Juni 2020).

Nota Kesepahaman Indonesia-Arab saat kunjungan Raja Salman, www.setneg.go.id. Diakses pada 11 November 2020.

Kuota dan Biaya Haji Indonesia 2008-2019, , Sumber Data: Kemenag RI/riset:Bayu D/Jatimnet.com. (diakses pada 1 Desember 2019).

McDonald, John W. (2003). Multi-Track Diplomacy [Online]. Tersedia dalam: http://www.beyondintractability.org/essay/multi-track-diplomacy. (Diakses pada 24 Oktober 2020).

Organisasi Kerjasama Islam (OKI), www.kemlu.go.id/portal/id/read. (Diakses pada 12 Oktober 2020).

Palestina menjadi perhatian Indonesia dalam pertemuan para Menlu OKI, https://kemlu.go.id/portal/id/. (Diakses pada: 27 Juli 2020).

Pembukaan Rapat Kerja BPKH", kemenag.go.id, (diakses pada Rabu, 5 Agustus 2020).

Pemerintah diminta lobi negara tetangga, https://www.cnnindonesia.com/nasional. (Diakses pada 27 Juli 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pimpinan Ormas Islam Bersama Raja Salman Bicarakan Persoalan Haji, https://www.cnnindonesia.com/nasional. (Diakses pada 27 Juli 2020).

Singarimbun, Masri dan Efendi, hal 33 dalam Mujdia Rahardjo. *Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel, dan Hipotesis dalam Penelitian*. Hal 1, http://repository.uin-malang.ac.id/2410/2/2410.pdf (Diakses pada 9 November 2019).

The definition of strategy, Oxford Dictionary https://en.oxforddictionaries.com/definition/strategy (diakses 8 Januari 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id